



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI



LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023

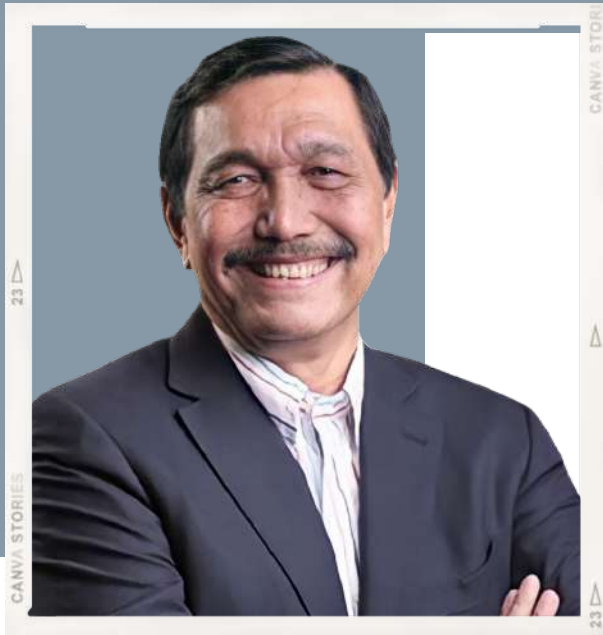
2023

LAPORAN
KEGIATAN



ARAHAN

Menko Marves



LUHUT B. PANDJAITAN MENTERI KOORDINATOR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Sebanyak 30 kegiatan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), beberapa telah sukses dan selesai dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta memiliki capaian yang maksimal.

Apresiasi disampaikan untuk anak bangsa atas karya dan keberhasilannya dalam pembangunan infrastruktur (jalan-jembatan-bendungan - jalan tol - bandara - pelabuhan dll) menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan kemaritiman dan investasi. Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia tetap menjadi tujuan besar kita. Apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengawal pembangunan kemaritiman dan investasi.





KATA Pengantar

ODO R.M. MANUHUTU

PLH. SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

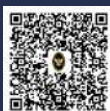


Laporan Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023.

Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi yang merupakan fungsi utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan atas koordinasi yang baik. Diharapkan informasi yang disajikan ke depan semakin berkualitas.

Plh. Sekretaris Kemenko



ODO R.M. MANUHUTU

RINGKASAN

Eksekutif

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam hal pencapaian visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 dan bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L.

Dalam laporan ini disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Laporan tahun 2023 memuat pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sepanjang tahun 2023.

Sejalan dengan tugas Kemenko Marves, peran strategis Kemenko Marves dalam melaksanakan pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi yaitu dengan adanya 3 (tiga) mandat langsung dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves yaitu: 1) Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia; 2) Menangani hambatan-hambatan investasi; dan 3) Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada 6 program prioritas bidang dan layanan kesekretariatan yaitu: bidang kedaulatan maritim dan energi; bidang sumberdaya maritim; bidang infrastruktur dan transportasi, bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta bidang investasi dan pertambangan.

Kemenko Marves melaksanakan 2 program yakni: Program Dukungan Manajemen serta Program Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.

Laporan tahun 2023 Kemenko Marves ini merupakan hasil dari kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja dari program yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kemenko Marves Tahun 2023, dan dilaksanakan sepanjang tahun 2023 oleh unit kerja di lingkup Kemenko Marves, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan beberapa telah sukses dan selesai dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta memiliki capaian yang maksimal.

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah rupiah) atau 99,11%, dari Pagu anggaran Kemenko Marves tahun anggaran 2023 sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas RibuRupiah).

Laporan kegiatan tahun 2023 ini, diharapkan akan semakin memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Kemenko. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.



Daftar Isi

Arahan Kemenko

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

1 Pendahuluan

11 Realisasi Anggaran

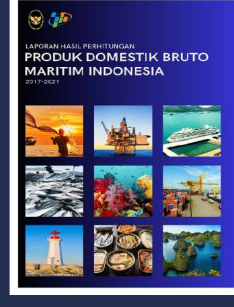
13 Capaian Kegiatan

VISI INDONESIA

2045

**“MENJADI NEGARA MAJU DAN
PUSAT PERADABAN MARITIM DUNIA”**



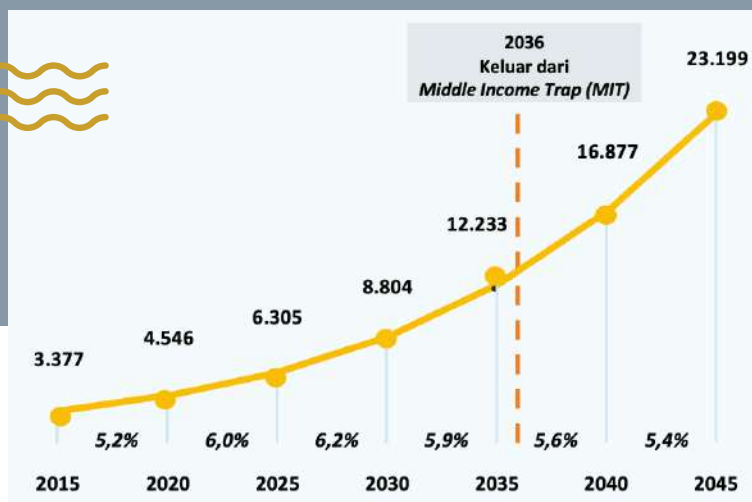


PENDAHULUAN



VISI PEMBANGUNAN MARITIM 2045

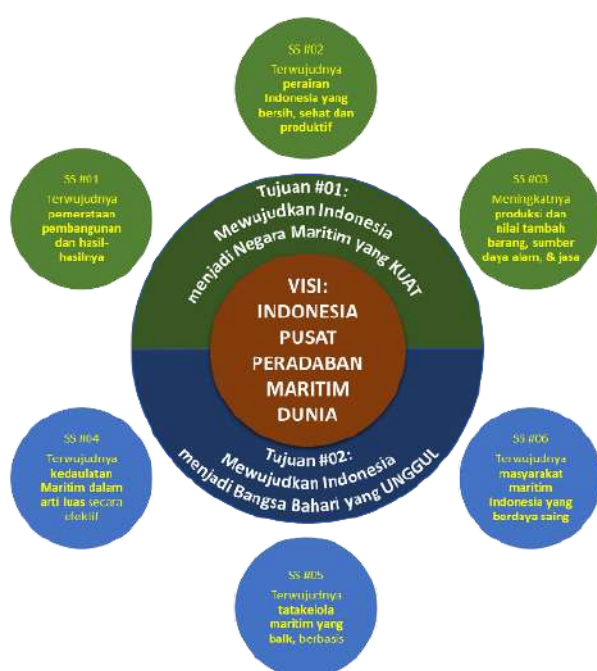
Untuk dapat menjadi negara maju sebelum 2045, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari skenario awal 5,7%



SKENARIO VISI 2045

Skenario Visi 2045 (Sebelum Pandemi) – PDB Per Kapita (USD) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata: 2015 – 2045:

5.7%



maritim.go.id

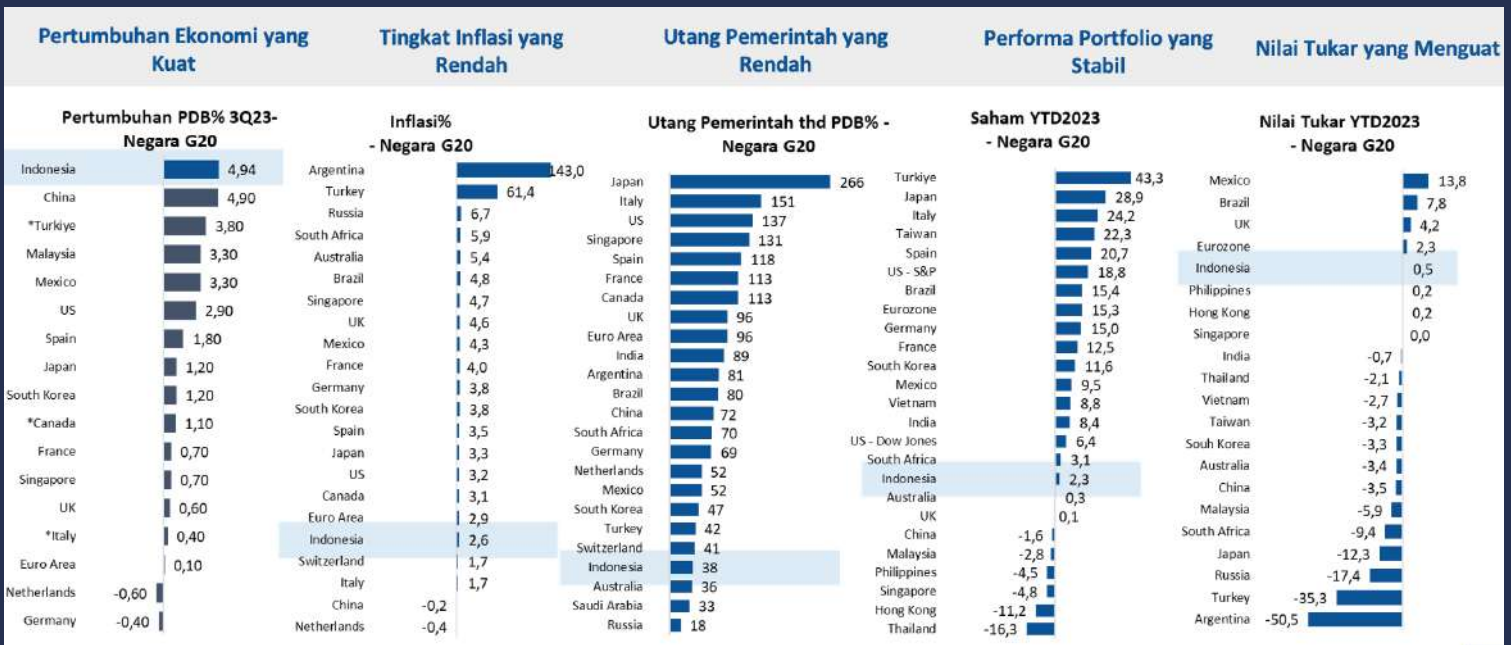
TUJUAN VISI

1. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang KUAT
2. Mewujudkan Indonesia menjadi Bangsa Bahari yang UNGGUL



TERBAIK *di G20*

Di tengah berbagai risiko dan tantangan global, indikator ekonomi makro Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di G20



Sumber: CEIC, Bloomberg, The Economist; Update 26 November 2023



TUGAS

Kemenko Marves

BERDASARKAN PERPRES 92/2019

Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Urusan Kementerian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
- Penyelesaian isu di bidang pembangunan kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



7 K/L

DI BAWAH KOORDINASI
KEMENKO MARVES



Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi :

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

FOKUS 6 KELOMPOK

KEMENKO MARVES

6

PEMBANGUNAN 2023

Jenis dan jumlah proyek/kegiatan pengendalian di 6 Kelompok Pembangunan yang dilaksanakan Kemenko Marves dan sedang dilaksanakan di Tahun 2023

3

**SASARAN
PEMBANGUNAN**



IKU NASIONAL
dalam RKP Tahun 2023

54

JANJI PRESIDEN



Bidang Kemaritiman
dan Investasi

30

MAYOR PROJECT



Bidang Kemaritiman
dan Investasi

33

PSN



Proyek Strategik
Nasional
Bidang Kemaritiman
dan Investasi

13

GOALS SDG'S



Pepres 111 Tahun 2022

32

**DIRECTIF
PRESIDEN**

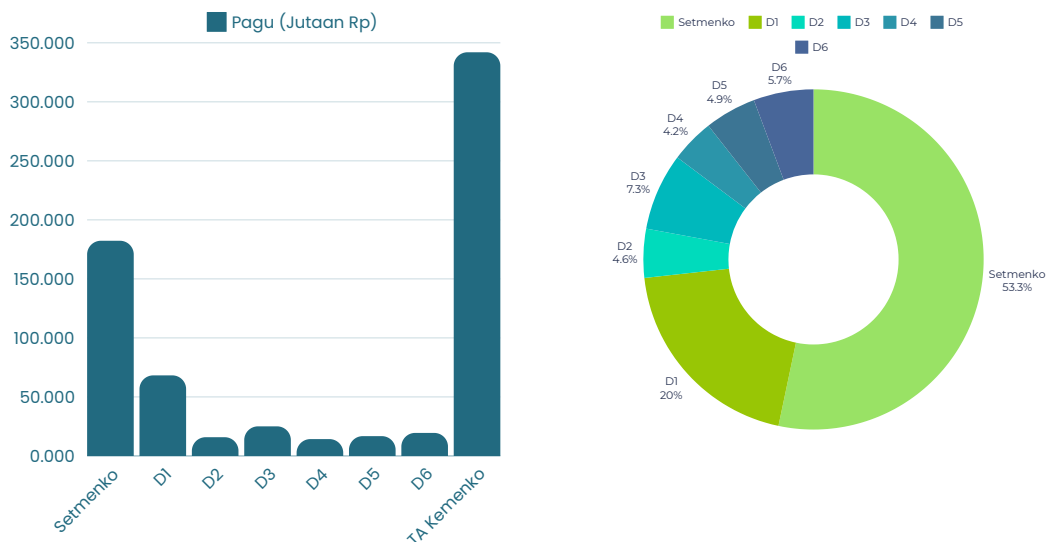
32 DIREKTIF PRESIDEN



PAGU ANGGARAN

TAHUN 2023

Pagu anggaran Kemenko Marves TA. 2023 telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi pagu anggaran definitif sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah),



Pagu

Setmenko	182.302.379.000,00
D1	68.244.583.000,00
D2	15.859.820.000,00
D3	25.056.272.000,00
D4	14.262.811.000,00
D5	16.767.416.000,00
D6	19.497.432.000,00
Kemenko	341.990.713.000,00



PAGU

ANGGARAN PER PROGRAM

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Rp159.688.334.000,00

46,69%

ANGGARAN PER KEGIATAN

- Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Rp68.244.583.000,00

19,96%

- Koordinasi Sumber Daya Maritim
Rp15.859.820.000,00

4,64%

- Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
Rp25.056.272.000,00

7,33%



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Rp182.302.379.000,00

53,31%

- Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
Rp14.262.811.000,00

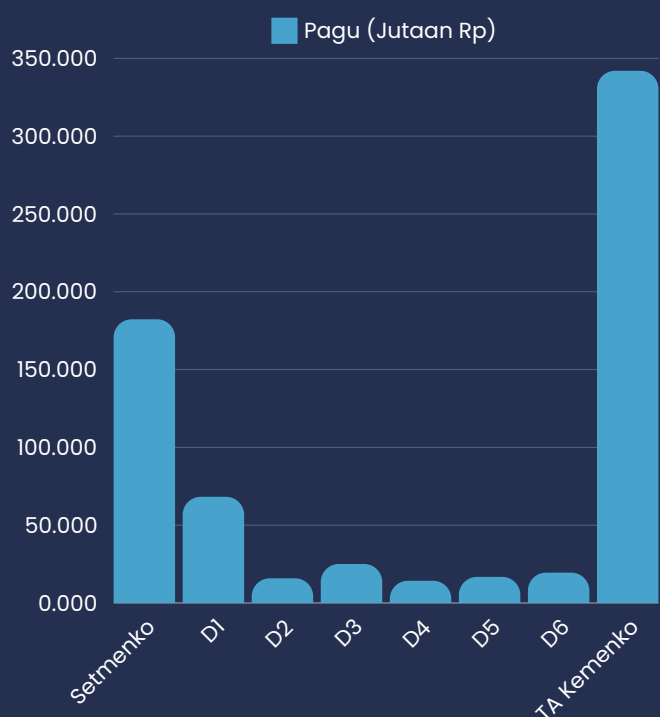
4,17%

- Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rp16.767.416.000,00

4,90%

- Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Rp19.497.432.000,00

5,70%



Pagu

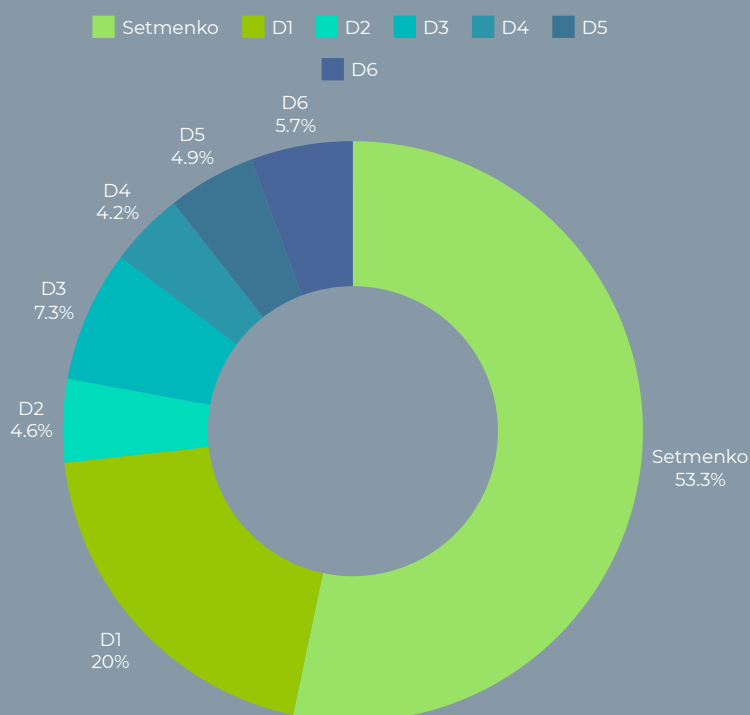
Setmenko	182.302.379.000,00
D1	68.244.583.000,00
D2	15.859.820.000,00
D3	25.056.272.000,00
D4	14.262.811.000,00
D5	16.767.416.000,00
D6	19.497.432.000,00

Kemenko 341.990.713.000,00

PAGU

ANGGARAN PER UNIT ESELON I

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)



REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kemenko Marves



Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Setmenko	182.302.379.000,00	179.658.501.267,00	98,55
D1	68.244.583.000,00	68.159.126.525,00	99,87
D2	15.859.820.000,00	15.852.885.092,00	99,96
D3	25.056.272.000,00	24.780.232.217,00	98,90
D4	14.262.811.000,00	14.248.671.059,00	99,90
D5	16.767.416.000,00	16.758.329.233,00	99,95
D6	19.497.432.000,00	19.483.165.619,00	99,93
Kemenko	341.990.713.000,00	338.940.911.012,00	99,11

Realisasi tertinggi pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (D2) sebesar Rp15.859.820.000,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp15.852.885.092,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah) atau 99,96%.

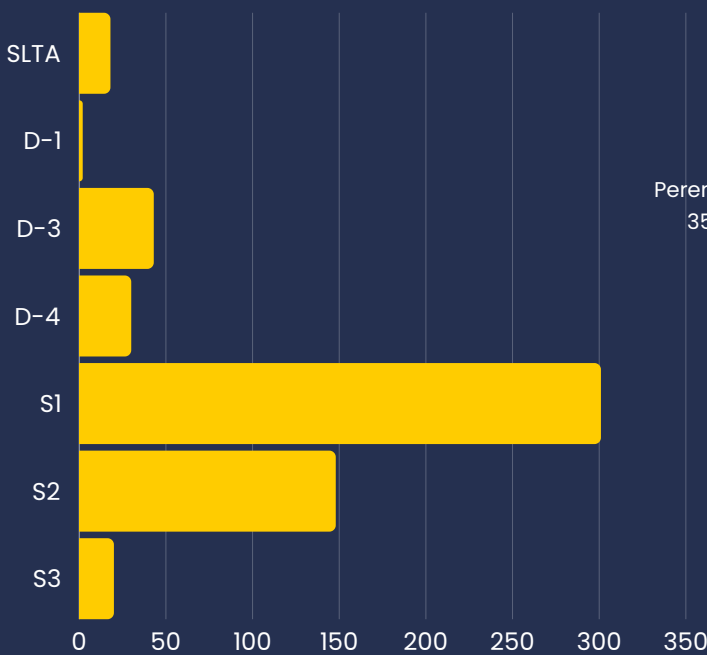




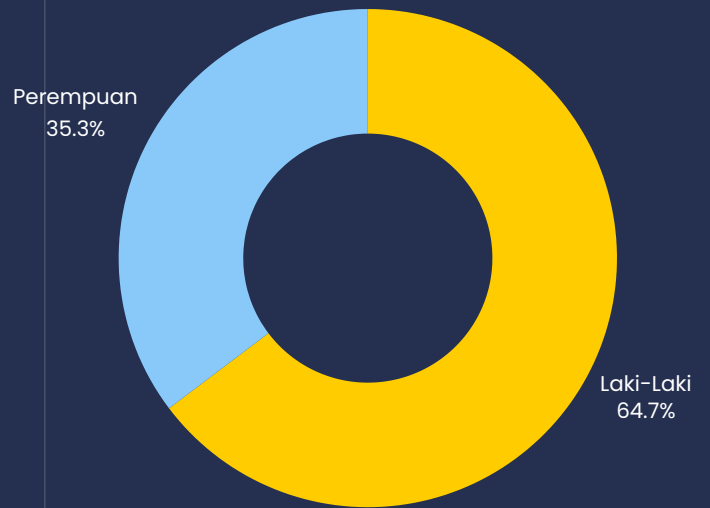
PEGAWAI

KEMENKO MARVES

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Perempuan	258 orang
Laki-Laki	473 orang
Total	730 orang

CAPAIAN KEGIATAN



BIDANG

KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang kedaulatan maritim dan energi

LANDAS KONTINEN *Indonesia*

Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan (archipelagic state) menurut UNCLOS 1982 berhak untuk mengklaim wilayah maritim tertentu yang ditarik dari garis pangkal yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 76 UNCLOS 1982, negara pantai berhak untuk melakukan pengajuan submisi untuk mengklaim batas terluar landas kontinen melebihi 200 mil laut atau yang biasa disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE)

UU No. 16 Tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam penetapan landasan hukum untuk mendukung pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia..



CAPAIAN 2023

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, untuk area selatan Jawa – Nusa Tenggara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (11-08-2022). Secara formal, dokumen submisi disampaikan oleh Duta Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan klaim submisi tersebut, Indonesia berpotensi memperluas landas kontinennya seluas 245.711 km².

Keseluruhan submisi tersebut, Indonesia berpeluang untuk untuk mendapatkan perluasan landas kontinen seluas 657,886.6 km², atau sekitar 1,5 kali luas Pulau Sumatera.

Submisi perluasan landas kontinen Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menambah luasan landas kontinennya.

AIS FORUM Tahun 2023

KTT AIS

Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah sebuah platform yang dirancang untuk mencakup negara kepulauan dan negara kepulauan tanpa memandang wilayah, ukuran, dan tingkat pembangunannya. Inisiatif global yang mempertemukan 51 negara kepulauan dan kepulauan untuk mengambil bagian dalam forum kolektif guna mengatasi tantangan pemanfaatan sumber daya laut untuk:

- pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- ketahanan terhadap perubahan iklim;
- polusi laut;
- manajemen darurat; dan
- peningkatan perikanan berkelanjutan.

KTT AIS Forum Tahun 2023 dilaksanakan pada 10 - 11 Oktober 2023, dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Tema dari AIS Forum Tahun 2023 adalah "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama"



CAPAIAN

- The 7th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Juni di Fiji.
- The 8th Senior Officials Meeting yang dilaksanakan pada bulan Agustus di Madagaskar.
- The 5th Ministerial Meeting yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 di Bali
- The 1st High Level Meeting yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023 di Bali dengan dihadiri oleh 32 negara partisipan AIS Forum dan 4 Organisasi Internasional
- Kerja sama pelatihan dengan Papua New Guinea.

TINDAK LANJUT 2024

- Penyusunan roadmap strategis dan modalitas dalam proses pembentukan AIS Forum sebagai sebuah Organisasi Internasional berbasis Traktat.
- Penyusunan regulasi nasional sebagai langkah kebijakan keberlanjutan pembentukan AIS Forum.
- Menerjemahkan Pledge Indonesia terkait dana hibah Pemri kepada negara pulau dan kepulauan kerangka AIS Forum.



CARBON CAPTURE AND STORAGE



Komitmen global dalam mencapai Net Zero Emission terhadap aksi perubahan iklim telah dilakukan pada 68 Negara (mencakup 88% emisi global)..

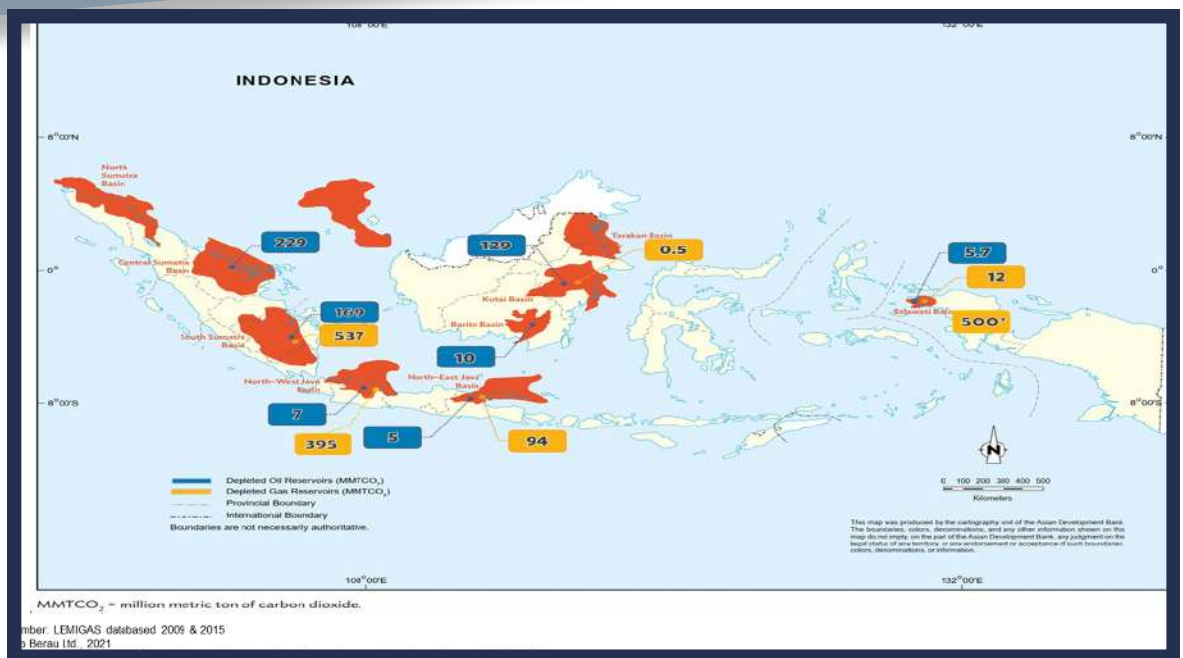
Untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE), teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) memiliki peranan penting dalam mereduksi emisi karbon pada kegiatan industri yang dihasilkan seperti pada kegiatan usaha hulu migas, pembangkit listrik, dan industri penghasil emisi lainnya.

CAPAIAN

- Memorandum Of Understanding (MoU) pada November 2021 antara Pertamina dan Exxon Mobil pada COP 26 Glasglow, UK
- Dibawah koordinasi Kemenko Marves, proses penyusunan draft RPerpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) hingga harmonisasi dilakukan dalam kurun waktu hampir 1 tahun
- Penandatanganan MoU Kerjasama Pemanfaatan CCS dan Advanced Petrochemical Complex dengan ExxonMobil; dan
- Penandatanganan Confidentiality Agreement Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) antara Pertamina Group dan Chevron Energy International Pte. Ltd.



TINDAK LANJUT



- Potensi CCS di Indonesia menurut Studi Lemigas Kementerian ESDM, 2 Giga Ton CO₂ di reservoir Migas dan 10 Giga Ton CO₂ di Saline Aquifer
- Mendorong percepatan pengesahan dan penerbitan RPerpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS);
- Menjajaki peluang kerjasama investasi di Industri CCS dengan Perusahaan luar negeri lainnya; dan
- Menjajaki peluang kerja sama bilateral dengan negara-negara lain di Kawasan Asia khususnya ASEAN dalam pengembangan CCS Hub



Ilustrasi skema cross border cooperation



GLOBAL SOUTH COLLABORATION

Global South Collaboration merupakan inisiatif Indonesia untuk bekerja sama dengan Negara Selatan-Selatan sebagai implementasi dari United Nation South-South Cooperation dan Semangat Bandung 1955.

Inisiatif ini juga merupakan implementasi dari Deklarasi Leaders G20 tahun 2022 yang menyatakan bahwa negara-negara G20 harus mendukung pembangunan negara-negara berkembang untuk maju dan mencapai agenda dan target Pembangunan Berkelanjutan 2030 (poin ke-4 dalam G20 Leaders Declaration).

Inisiatif ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang setara dan pembangunan yang berkelanjutan, melalui peningkatan kerja sama multisektor yang strategis antar Negara Selatan-Selatan.

Salah satu poin penting dalam Leaders' Declaration KTT G20 adalah bahwa anggota G20 akan terus berinvestasi ke negara berpenghasilan rendah dan menengah dan negara berkembang lainnya, melalui berbagai sumber dan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk untuk mengkatalisasi investasi swasta, untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

CAPAIAN 2023

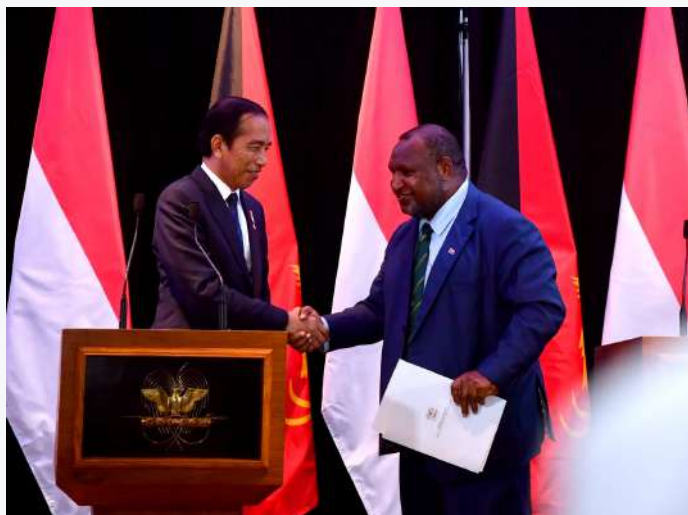
- 12 MoU G2G kerja sama pada sektor perdagangan dan investasi, energi, pertambangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan.
- 2 MoU G2B kerja sama sektor pertambangan.
- 19 MoU B2B kerja sama sektor pertambangan, energi, pertanian, peternakan, industri pertahanan, kesehatan, logistik, dan industri tekstil (BUMN dan Private Sector) dengan valuasi ekonomi awal senilai 4.5 Miliar USD

TINDAK LANJUT 2024

- Mendorong implementasi kerja sama seluruh sektor terkait;
- Pemberian pelatihan kepada negara-negara target di Afrika;
- Menjajaki peluang kerja sama bilateral dengan negara-negara lain di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Pasifik;
- Penyelenggaraan the First Senior Official Meeting and Ministerial Meeting Global South Collaboration.



PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA - PAPUA NUGINI



Papua Nugini merupakan salah satu negara yang telah menjalin hubungan kemitraan komprehensif dengan Indonesia dan berbagi kepentingan bersama sebagai tetangga dekat Indonesia. Papua Nugini juga merupakan salah satu negara di Pasifik dimana Indonesia melalui Poros Maritim Dunia mempunyai keinginan untuk memperkuat kerja sama antar kedua negara.

Pelaksanaan percepatan implementasi kerja sama ini diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut peningkatan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini yang diawali oleh kunjungan Bapak Presiden RI ke Port Moresby pada 5 Juli 2023. Pada kunjungan tersebut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam meningkatkan kerja sama dengan negara-negara pasifik termasuk Papua Nugini. Pada tanggal 7-8 September 2023 telah terlaksananya kunjungan balasan oleh Perdana Menteri Papua Nugini ke Jakarta pada kegiatan Indonesia Sustainability Forum.

Tahun 2023 membuka dan mengidentifikasi area kerja sama yang berpotensi dapat didorong dalam konteks Peningkatan Kerja Sama Bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, diantaranya:

- Klaster Hilirisasi;
- Klaster Kelistrikan;
- Klaster Pendidikan;
- Klaster Konektivitas; dan
- Klaster Infrastruktur;



BIDANG KERJA SAMA

Beberapa bidang kerja sama yang dapat ditingkatkan

- **Keamanan di Papua:** Pendekatan kerja sama ekonomi diharapkan dapat meredam isu ini
- **Perdagangan dan Investasi:** Keduanya memiliki sektor ekonomi yang komplementer, yang memungkinkan pertukaran barang dan investasi yang saling menguntungkan.
- **Energi dan Pertambangan:** Kerja sama dalam bidang ini dapat meningkatkan keamanan pasokan energi di kawasan dan menguntungkan kedua belah pihak.
- **Pariwisata:** Kerja sama di sektor pariwisata dapat membantu mempromosikan destinasi wisata kedua negara dan meningkatkan kunjungan wisatawan, akan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan pengembangan masyarakat lokal.
- **Keamanan Maritim:** kerja sama dalam keamanan maritim sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Pasifik, mencakup penanggulangan ilegal fishing, perampokan laut, serta kerjasama dalam penegakan hukum maritim.
- **Pengembangan Infrastruktur dan Kapasitas Manusia:** Dukungan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara.

TINDAK LANJUT 2024

- Monitoring dan evaluasi perencanaan tindaklanjut Kerjasama bilateral antara Indonesia-Papua Nugini;
- Mendorong stakeholder terkait untuk dapat menindaklanjuti lebih konkrit peluang kerja sama yang telah dibangun;
- Koordinasi atau pun dialog akan segera dilakukan percepatan penyelesaian atas kendala yang ada pada tahun 2023.



KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (KKI)

Rencana Aksi KKI
tertuang dalam
Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2022
tentang Rencana Aksi
Kebijakan Kelautan
Indonesia Tahun 2021-
2025



Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, perlu disusun Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagai pedoman umum kebijakan kelautan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan K/L di bidang kelautan.,

Pelaksanaan KKI dijabarkan melalui dokumen Rencana Aksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Kemenko Marves mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi. Sebagaimana pasal 4, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Inovasi untuk pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 antara lain:

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 113/D1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.
- Setiap Kelompok kerja didampingi oleh seorang verifikator dari Kemenko Marves untuk membantu dan mengarahkan prosedur serta membantu kesulitan L/K yang memiliki kendala terhadap penginputan laporan pada SISMONEV 2.0.

Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional

Dasar pelaksanaan rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional koordinasi adalah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



Catatan Kementerian ESDM, cadangan gas bumi di Indonesia sekitar 54,83 Triliun Kaki Kubik Persegi (Trillion Cubic Feet/TCF) yang dinyatakan proven, probable dan possible (3 P) dari lapangan migas yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi hingga Papua.

Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas yang ada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

BIDANG

SUMBER DAYA MARITIM

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu dibidang sumber daya maritim



EKONOMI *Biru*

Ekonomi Biru (Blue Economy): Pemanfaatan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Penghidupan dan Lapangan Kerja, serta Kesehatan Ekosistem Laut, meliputi kegiatan sebagai berikut

■ Energi Terbarukan

Energi Kelautan Berkelanjutan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi

■ Perikanan

Perikanan laut berkontribusi terhadap lebih dari USD270 miliar setiap tahun terhadap PDB. Perikanan yang berkelanjutan dapat memberi hasil yang lebih tinggi dan stok ikan yang mencukupi kebutuhan masa akan datang

■ Transportasi Maritim

Lebih dari 80% perdagangan dunia dibawa melalui laut dan jumlahnya diperkirakan akan berganda di 2030 dan 4x lipat di 2050

■ Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan permukaan air laut, erosi, dan perubahan arus laut. Namun, lautan juga penting dalam penurunan karbon dan memitigasi perubahan iklim

■ Pariwisata

Turisme laut dan pesisir dapat membawa lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Negara berkembang dan negara kepulauan menerima lebih dari 41 juta pengunjung tiap tahunnya

■ Manajemen Limbah

80% limbah dilaut berasal dari daratan. Pengelolaan limbah di darat akan membantu akselerasi perbaikan laut

#2

POTENSI EKONOMI BIRU

Negara kepulauan terbesar dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia



Produsen terbesar ke-2 pada Perikanan Tangkap dan Budidaya (global share: 8% fishery; 12% Aquaculture)

Kaya akan keanekaragaman hayati laut dan potensi sumber daya laut



Sumber daya perikanan mencakup 37% spesies di seluruh dunia



Produsen rumput laut terbesar ke-2 di dunia (28% output global)



Kontribusi terhadap PDB mencapai USD 33 Miliar (2.77% PDB pada 2021)



STRATEGI PENCAPAIAN



Strategi pengembangan blue economy:

- **Memperluas Kawasan Konservasi Laut**

Strategi yang bisa dilakukan guna menambahkan luas kawasan konservasi laut diantaranya Penetapan kawasan konservasi, Perlindungan kawasan cadangan karbon biru, Perbaikan dan peningkatan populasi ikan, Perlindungan keanekaragaman hayati laut dan Peningkatan kualitas kawasan konservasi.

- **Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota**

Kebijakan Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota mengedepankan kepentingan nelayan lokal melalui pembangunan kampung nelayan modern. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menggerakkan perekonomian nasional sebagai penghasil devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan industri berbasis komoditas unggulan sehingga tidak hanya menyumbang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, namun juga menjamin keberlanjutan sumber daya ikan serta melindungi jasa ekosistem lainnya.

- **Pengembangan Perikanan Budi Daya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan**

Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi. Untuk efisiensi dan efektivitas peningkatan produksi, diterapkan penggunaan induk unggul dan benih bermutu, pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik komoditas, dan IoT dalam manajemen pakan.

- **Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pengelolaan terpadu kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil berfokus pada pulau kecil dengan luas kurang dari 100 km², pulau kecil terluar, dan pesisir yang mengalami kerusakan ekosistem.



IKLI

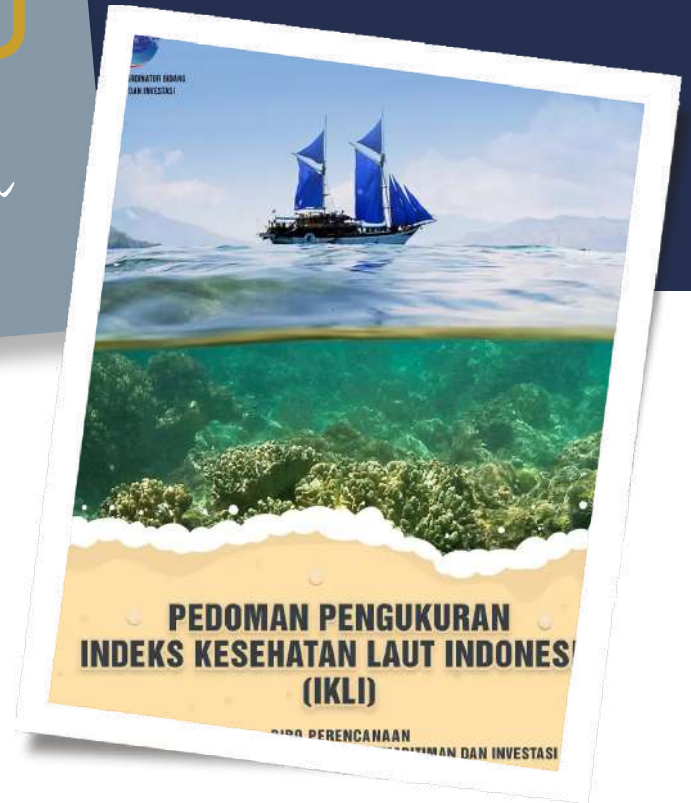
Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) disusun dalam rangka menjalankan amanat pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta melakukan pengelolaan secara berkelanjutan guna mendukung agenda pembangunan 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

IKLI memiliki fungsi strategis dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dikarenakan proses pengukuran IKLI tidak hanya mempertimbangkan dimensi ekologi dan fisik semata, namun juga mengikut sertakan parameter-parameter sosial-ekonomi dalam mengevaluasi manfaat lautan atas produk dan jasa lingkungan yang diperoleh manusia.

IKLI dapat disebut sebagai alat ukur kesehatan laut Indonesia yang mengadopsi kerangka Ocean Health Index (OHI). 10 tujuan atau target utama IKLI merupakan hasil adopsi dari OHI.

Kemenko Marves menginisiasi dan mengoordinasikan para pemangku kepentingan untuk menyusun Indeks Kesehatan Laut Indonesia yang merupakan kerangka OHI dan telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan Indonesia.



Perhitungan IKLI telah dilakukan selama 3 tahun, yaitu 2020, 2021 dan 2022.

Kemenko Marves telah menyusun Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), yang dapat dijadikan pedoman untuk pengukuran kesehatan laut.

Capaian Hasil Pengukuran IKLI tahun 2020 - 2022



TATA KELOLA *Sawit*

TARGET

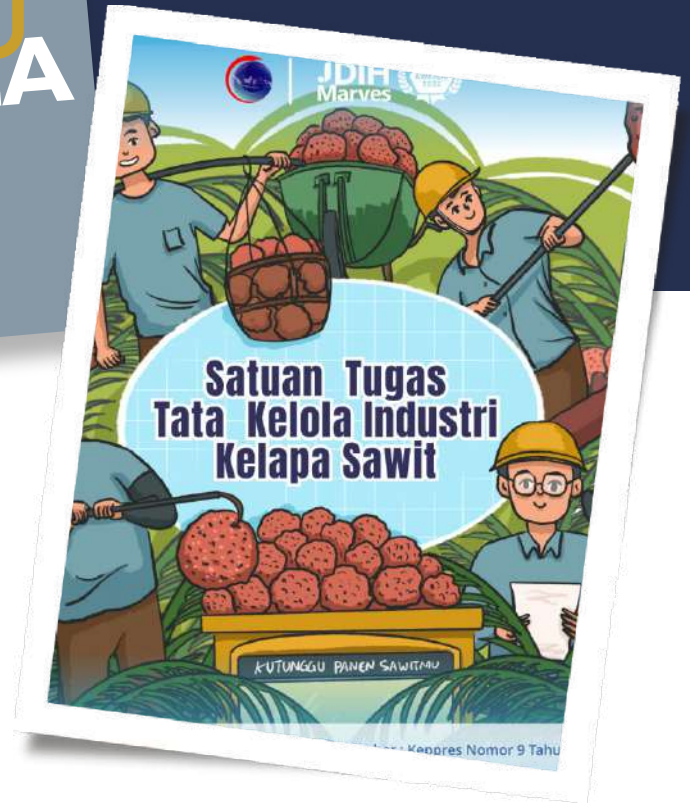
Tercapainya tata kelola industri kelapa sawit dan perkembangan peningkatan pendapatan negara dari pajak yang dapat ditempuh dengan cara antara lain:

- Penyelesaian HGU dalam Kawasan Hutan;
- Pendataan sawit rakyat (Program PSR dan Plasma);
- Mendorong Penagihan PNPB dan Denda Administratif.

PERAN MARVES

Menko Marves selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, sementara Deputi Bidang Sumber Daya Maritim selaku Sekretaris I Pelaksana Satuan Tugas, sesuai Keputusan Presiden No. 9 tahun 2023.

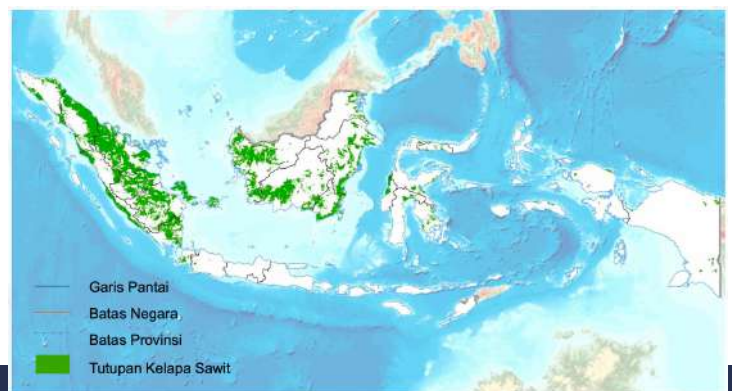
Sistem Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan (SIPERIBUN) merupakan pelaporan mandiri (self reporting), sebagai salah satu bentuk pengawasan. Jumlah perusahaan pasca self reporting tercatat meningkat 94%, menjadi 1.870 pada tahap I. Pada tahap II menjadi 2.139 perusahaan atau meningkat 123%. Adapun sebelum self reporting hanya terdaftar 959 perusahaan.



HASIL

- Terkoordinasinya Penyelesaian Tata Kelola Industri Kelapa Sawit;
- Kerjasama antar K/L untuk rekonsiliasi data subyek hukum guna penyelesaian Pasal 110A dan 110B UUCK;
- Terakumulasi sejumlah 2.128 Perusahaan perusahaan sawit pada SK Datin dengan indikasi luasan 2,17 juta merupakan hasil dari verifikasi perusahaan dan koordinasi antar K/L.

Tutupan Kelapa Sawit Nasional



TATA KELOLA

Sawit #2

Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan - 110B:



STRATEGI PENYELESAIAN POTENSI PNBP Tahun 2023

- Jumlah Perusahaan dalam Daftar Final 2.128 ± 2,17 juta ha
- Jumlah Perusahaan yang Sudah Diidentifikasi 110A 283 (± 669.286 ha)
- Jumlah Perusahaan yang Sudah Diidentifikasi 110B 199 (± 28.671,88 ha)
- Jumlah Perusahaan masih dalam proses identifikasi 1.646

LANGKAH PERBAIKAN



Penerbitan SK Menteri tentang Tata Kelola Pengurusan Kelapa Sawit Terbangun dalam Kawasan Hutan Yang Memiliki izin Lokasi/atau IUP sesuai tata ruang



Penambahan tenaga spasial dari detasering BPKH dan Tenaga Ahli



Weekly Report Perkembangan Penerbitan SK Tagih



Pembentukan SK Timdu Satuan Provinsi (diutamakan desk analysis)



Penambahan sarana prasarana pendukung untuk proses penelaahan spasial

Tata Kelola GARAM

PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Kebutuhan garam nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 4,5 juta ton yang terdiri atas kebutuhan industri pengolahan sebesar 3,7 juta ton dan konsumsi 800 ribu ton baik untuk rumah tangga maupun komersial. Untuk menjaga pasokan garam, biasanya Indonesia mengimpor dari negara lain.

Cuna mengurangi tingkat kebergantungan terhadap impor garam, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan terhadap pembuatan garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.

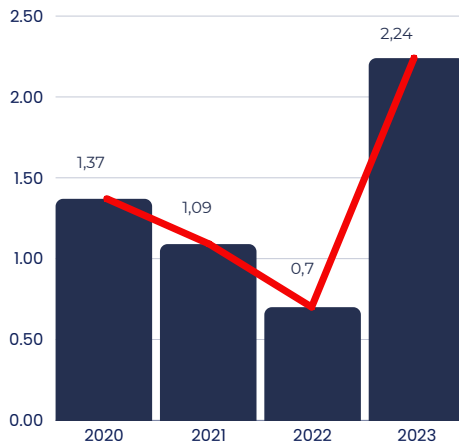
KEBUTUHAN GARAM NASIONAL

- Garam konsumsi
- Garam untuk industri aneka pangan
- Garam untuk industri penyamakan kulit
- Garam untuk water treatment
- Garam untuk industri pakan ternak
- Garam untuk industri pengasinan ikan
- Garam untuk industri peternakan dan perkebunan
- Garam untuk industri sabun dan deterjen
- Garam untuk industri tekstil
- Garam untuk pengeboran minyak
- Garam untuk industri farmasi
- Garam untuk kosmetik
- Garam untuk industri kimia atau chlor alkali

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja, yaitu: Produksi Garam pada SEGAR; Kualitas Garam pada SEGAR; dan Penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR.



CAPAIAN PRODUKSI GARAM 2020 S.D 2023



Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Peningkatan produksi garam industri, sasarannya adalah untuk menunjang rencana pemerintah di sektor industri kimia dasar, industri aneka pangan, farmasi, dan perminyakan yang terus tumbuh dan makin berkembang dan bertujuan untuk mendapatkan, ataupun meningkatkan nilai tambah serta menciptakan produk industri yang berorientasi ekspor.



Meningkatkan produksi dan produktivitas lahan pergaraman 100 ton/ha dan kualitas garam 85 persen premium, dengan NaCl di atas 94,7 persen, kontribusi PT garam sebesar 15 persen dari produksi nasional sebanyak 2,8 juta ton.

PERAN

*Kemenko
Marves*

Menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan daya saing garam nasional melalui program pergaraman terpadu, transformasi dan efisiensi, serta terus bersinergi dengan pergaraman rakyat.

Mendorong strategi hilirisasi melalui penambahan garam olahan setiap tahun, dan juga memperjuangkan tata niaga garam yang sehat dan berkeadilan melalui kebijakan fiskal agar daya saing makin kuat demi menghadapi tantangan garam impor



OCEAN 20

Ocean 20 atau O20 menjadi salah satu forum untuk para anggota G20 dalam menyampaikan pemikiran dan kontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Forum Ocean 20 dibentuk dengan tujuan menghasilkan kebijakan yang konkret dan memberikan rekomendasi serta strategi mengenai ekosistem laut yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama baik regional maupun internasional.



Indonesia mendapatkan dukungan besar yang disampaikan oleh para pembicara dan peserta Ocean20 Dialogue karena telah menginisiasi sebuah forum kelautan yang harus dimiliki oleh Group sebesar G20 yang menguasai 43% ZEE dunia dan mewakili 80% PDB dunia. Selain itu juga Indonesia berhasil melaksanakan Trilateral Meeting Indonesia-India-Brazil untuk mempersiapkan Ocean20 sebagai New Engagement Group G20 pada tahun 2024 di Brazil.



Presidensi G20 Indonesia menyediakan forum Ocean 20 seiring dengan anggota G20 yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem laut.

Anggota G20 yang merupakan kelompok dari 20 ekonomi terbesar dunia ini membentuk 45 persen dari garis pantai dunia serta 21 persen dari zona ekonomi eksklusif laut.

Kebijakan dan rekomendasi tersebut dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi laut sekaligus melindungi, memulihkan dan memperbaruinya.

INDUSTRI

Rumput Laut

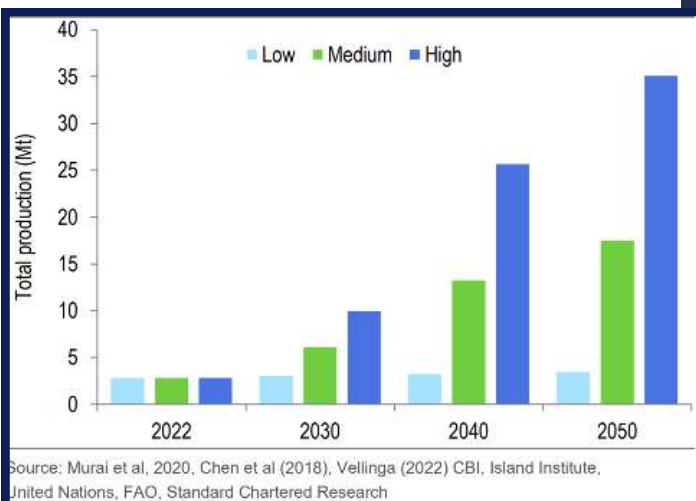
Pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi rumput laut sebagai salah satu komoditi perikanan utama nasional.

Kemenko Marves dan World Bank bekerja sama dalam pengembangan rumput laut terintegrasi hulu ke hilir.



Kemenko Marves mengembangkan kawasan budidaya rumput laut, di wilayah Teluk Ekas, Lombok Timur. Dan akan berkembang hingga ke wilayah NTB di Pulau Sumbawa.

Sementara dibutuhkan kawasan seluas 2.400 hektar, akan terus berkembang dalam jumlah yang lebih luas, sesuai dengan kebutuhan.



Food Related Seaweed Estimated Demand

Selama ini rumput laut hanya dikirim dalam bentuk mentah. Ke depan, paling tidak rumput laut yang dikirim ke luar negeri sudah dalam bentuk barang setengah jadi. Agar nilai ekonomi dari aktivitas ikutan pengolahannya bisa dilakukan di dalam negeri dan mengendap di dalam negeri.

PENELITIAN RISET KELAUTAN OCEANX

Kemenko Marves menggandeng Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) serta melaksanakan koordinasi dengan stakeholder guna pelaksanaan riset maritim OceanX Expedition di perairan Indonesiaini melalui kerja sama Penelitian Riset Kelautan OceanX. .



Kerja sama ini sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan juga bagi masyarakat global. seluruh pemangku kepentingan nasional telah menyatakan dukungannya terhadap ekspedisi ini.

Kolaborasi ini akan memberikan tambahan data baru dan memperbaharui informasi kelautan.



Hanya sebagian kecil dari perairan Indonesia yang telah dieksplorasi. Oleh karena itu, kolaborasi ini akan memberikan tambahan data baru dan memperbaharui informasi kelautan

BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang infrastruktur dan transportasi



Percepatan Pembangunan INFRASTRUKTUR IKN

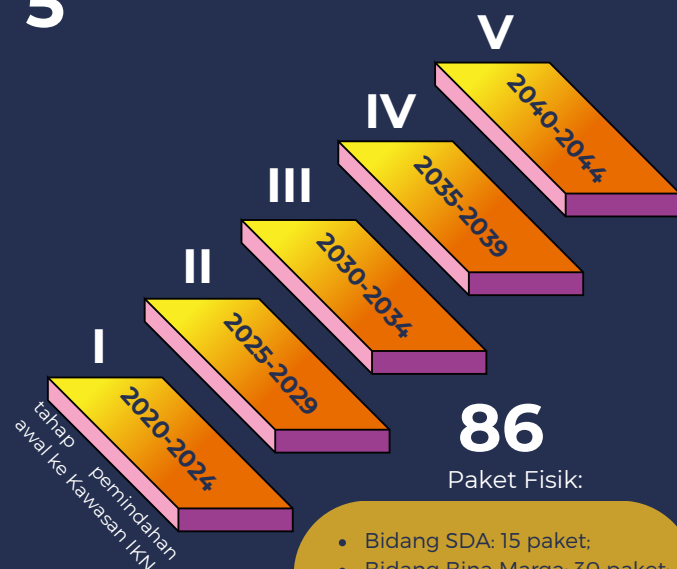
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan wilayah agar mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan Luar Wilayah Jawa.

Untuk mendukung pengembangan IKN, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang terbit pada tanggal 15 Februari 2022. UU IKN mengatur ketentuan mengenai cakupan wilayah dan fungsi dari IKN.

3 Pengembangan Wilayah Perencanaan (WP)

- Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN).
- Kawasan IKN (KIKN).
- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

5 Tahapan Pembangunan



- Bidang SDA: 15 paket;
- Bidang Bina Marga: 30 paket;
- Bidang Cipta Karya: 33 paket;
- Bidang Perumahan: 8 paket.

Progres capaian per Desember 2023,
Batch 1 (2020 – Maret 2023) : 70,20%
Batch 2 (Maret 2023 – 2024) : 21,27%.

Pemerintah mendorong gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini merupakan momentum bagi Industri Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi dengan pemenuhan permintaan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, dimana Pemerintah telah mencanangkan Program Substitusi Impor sebesar 35% pada tahun 2022..

Dalam rangka mendukung pelaksanaan P3DN, Pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN untuk menggunakan produk hasil industri dalam negeri.

Peningkatan PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI [P3DN]

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan P3DN telah diselesaikan kebijakan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim P3DN lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN

Integrasi dan Digitalisasi Pengadaan :

- kode KBLI dan KBKI sudah mengalir ke dashboard LKPP,
- penyederhanaan syarat e-katalog,
- integrasi E-Catalog dengan SIINAS, dan ke KKPD/KKI.



Capaian 2023

Peningkatan Realisasi Belanja PDN



Peningkatan Jumlah Produk di e-Katalog



Pertumbuhan Ekonomi Q1 - Q3 2023



Penyerapan Tenaga Kerja Q1 2023



KLBB

[KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI]

Kebijakan pemerintah yang memberikan support bantuan berupa keringanan pajak. Mulai 20 Maret telah ada bantuan baru dalam program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), Insentif PPNDTP mobil listrik dan bus listrik.



tahun 2023, bantuan pemerintah senilai Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit kendaraan sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50 ribu sepeda motor konvensional berbahan bakar minyak ke listrik



PERAN KEMENKO MARVES

- Inisiator dalam Pengundangan Revisi Permenperin 6/2023, penyusunan PMK terkait bantuan pemerintah untuk KBLBB roda dua serta penyederhanaan sistem sisapira.id.
- Integrasi sistem dukcapil dengan Sisapira.id (termasuk penandatanganan MoU dan PKS Kemendagri dan Kemenperin).
- Penyusunan PMK pengalihan anggaran bantuan pemerintah dari Kemenperin kepada Bank Himbara.
- Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 secara terbatas khususnya relaksasi TKDN dan insentif CBU.
- Terbitnya PermenESDM 3/2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai serta KepmenESDM 39/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
- dll





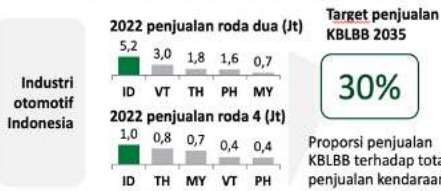
Pemerintah meluncurkan insentif PPNDTP untuk KBLBB Roda 4 dan Bus melalui PMK 38/2023 jo. PMK 116/2023 dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi pada ekosistem kendaraan listrik pada April 2023.

Terdapat lonjakan pemesanan motor listrik subsidi telah nembus 2.000 unit (tepatnya 2.431 terhitung September 2023).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkomitmen untuk mendukung untuk pengembangan KBLBB di Indonesia. hal tersebut terus dilakukan dengan mengkoordinasikan bersama K/L teknis guna mensukseskan pengembangan KBLBB ini.



Indonesia merupakan salah satu pasar dan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara



Pemerintah mendorong adopsi dan investasi industri melalui berbagai insentif

- Insentif untuk adopsi KBLBB**
- IDR 7 Jt untuk pembelian baru
 - IDR 10 Jt untuk konversi
 - PPN: dari 11% menjadi 1%
 - PPnBM 0%
 - Bebas ganji genap

Program investasi untuk industri KBLBB

- Relaksasi kuota impor dan bea masuk CBU
- PPH 22 dengan tarif terendah
- Penyesuaian target TKDN
- Berlaku untuk produsen yang berkomitmen melakukan produksi domestik

1. Targeting 30% new sales share, for 2W: projected total sales 6.4 Mn unit at price USD 1,000-1,300; 4W: projected total sales 2 Mn unit at price USD 20-30 thousand
Sources: Kemopernis, AISI, IPEM UI



“Indonesia merupakan salah satu pasar dan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara”



HDCM RI - RRT



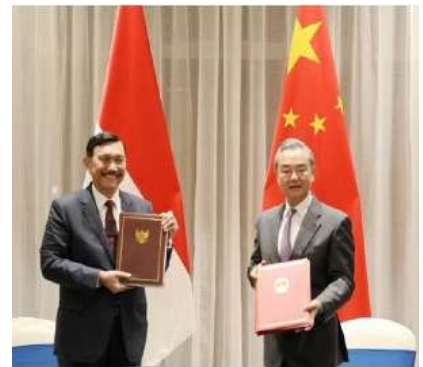
High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) merupakan kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok (RRT). Tujuannya untuk merencanakan bersama perkembangan masa depan, menikmati bersama kemakmuran dan kemajuan, dan membangun bersama komunitas sosial yang lebih baik antara Indonesia - RRT.

HDCM merupakan kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Wang Yi yang saat itu menjabat Dewan Pemerintahan sekaligus Menlu China dan Luhut pada 5 Juni 2021

Kerja sama baru dengan Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, budaya, kemaritiman, dan saling mendukung pembangunan di kedua negara demi terciptanya kemakmuran regional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menandatangani MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) bersama Wang Yi. Dalam perjanjian tersebut, Luhut B. Pandjaitan dan Menlu China bertindak sebagai Co-Chair HDCM. Hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Berbagai bidang strategis yang disepakati yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan vaksin Covid-19, proyek ekonomi besar, pengembangan digital, dan keamanan laut.

SNAPSHOTS:



Pembahasan dari kerja sama antara kedua negara pada tahun 2023:

- MoU terkait One Belt One Road (OBOR) antar kedua pihak dan visi Indonesia tentang Poros Maritim Global, terutama dalam mendorong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
- 5 kesepakatan, yaitu Solidaritas Politik, Vaksin COVID-19, Pembangunan Infrastruktur, Kemaritiman, dan Pertukaran Budaya dan Pariwisata.
- kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok mencakup berbagai bidang dan membantu Indonesia melakukan transformasi perekonomian.
- program hilirisasi mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku, mendorong industrialisasi, dan menyebarkan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
- pembangunan yang berpusat pada masyarakat antara kedua negara membantu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.
- mendorong investor Indonesia untuk investasi ke Tiongkok





ANGKUTAN BARANG DARI & KE DAERAH 3 TP [TOL LAUT]

Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Program Tol Laut merupakan salah satu bentuk kewajiban pelayanan publik angkutan barang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Dalam Peraturan Presiden tersebut Kemenko Marves bertugas untuk melakukan dukungan koordinasi dan pengawasan percepatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, untuk itu Kemenko Marves telah menetapkan tim gugus tugas melalui Keputusan Menko Marves No. 53 tahun 2022.

Tahun 2023 aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan tol laut, seperti Sitolaut dan lainnya dapat diintegrasikan ke NLE, agar semua bisa memantau, mengawasi, dan juga memudahkan dalam menyeleraskan arus lalu lintas barang dan dokumen.



PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA & *Jabar Selatan*

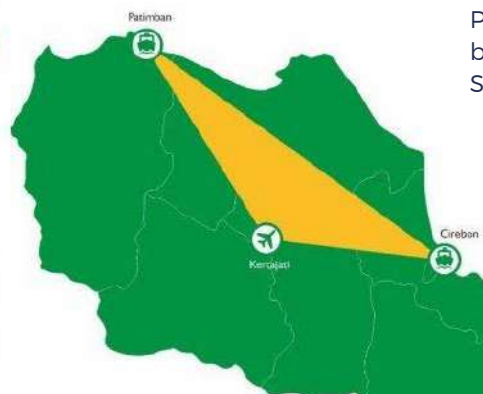


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam instruksinya, Presiden RI menegaskan bahwa Percepatan kedua kawasan itu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan..

Kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Sedangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) meliputi enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

SEGITIGA REBANA

Terletak diantara Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon



Peran Kemenko Marves atas capaian tahun 2023: telah terlaksana:

- Pengendalian percepatan pembangunan Breakwater Pantai Timur di Pangandaran
- Inpres Jalan Daerah Rekonstruksi Jalan Legok – Paseh (Kab. Sumedang)
Rekonstruksi Jalan Paseh – Conggeang (Kab. Sumedang)
Rekonstruksi Jalan Conggeang – Buahdua (Kab. Sumedang)
Preservasi Jalan Cipasung - Subang - Cilebak (Kab. Kuningan) - Kutaagung/Dayeuhluhur (Kab. Cilacap)
Pembangunan Jalan Cipari – Cisantana (kab. Kuningan)
Pengembangan Kawasan Agribisnis berbasis korporasi petani di Kab. Sumedang dan Kuningan

BEASISWA METALURGI

33 orang awardee LPDP yang menerima beasiswa program Metalurgi



Kemenko Marves bersama LPDP serta Northeastern University (NEU) dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd bekerja sama dalam program beasiswa Metalurgi. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian dan pendidikan di bidang metallurgical engineering.

33 orang awardee LPDP yang menerima beasiswa program Metalurgi pada tahun 2023, dengan rincian ke NEU ada sebanyak 26 orang kemudian untuk ke CSU sebanyak 7 orang.

Durasi studi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk studi lapangan di Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.

Sasaran program beasiswa kerja sama Metalurgi NEU adalah warga negara Indonesia dari masyarakat umum selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian, program beasiswa kerja sama Metalurgi NEU ini juga diperuntukkan pada jenjang magister satu gelar (single degree).

Masa studi akan berlangsung dari tahun 2023 hingga 2026 pada program studi tujuan Metallurgical Engineering, di Northeastern University, Tiongkok. Setelah lulus studi, penerima beasiswa memiliki kewajiban untuk bekerja pada industri ZHC Co. Ltd yang berada di Indonesia selama dua tahun.

BIDANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan



Penanganan SAMPAH LAUT

Sampah laut merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani secara terintegrasi, karena telah memberi dampak negatif pada sektor pariwisata, lingkungan dan kesehatan manusia.

Sampah yang terdapat di kawasan wisata bahari memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi industri pariwisata itu sendiri.

Sampah laut merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani secara terintegrasi, karena telah memberi dampak negatif pada sektor pariwisata, lingkungan dan kesehatan manusia.

Sampah yang terdapat di kawasan wisata bahari memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi industri pariwisata itu sendiri.

Kemenko Marves, fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan plastic debris, penyusunan dan analisis PDB Kemaritiman untuk formulasi kebijakan.

5 strategi penanganan sampah laut

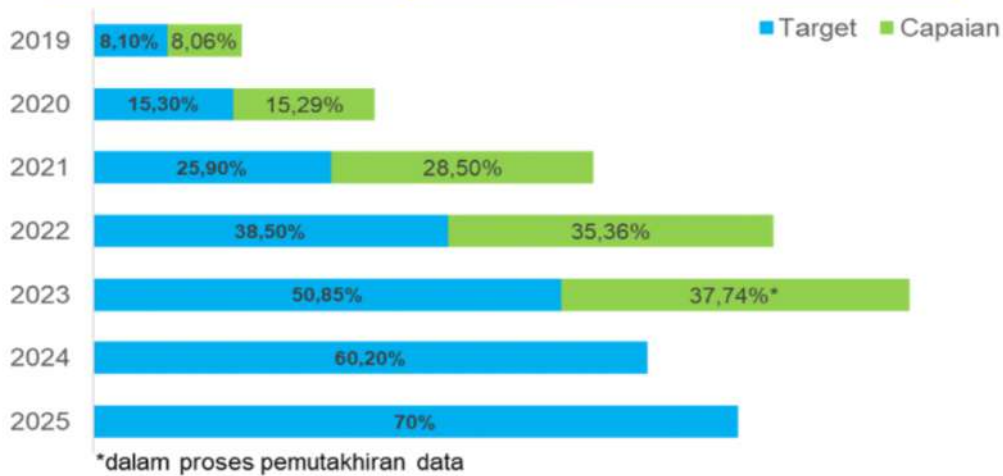
- Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan;
- Pengelolaan Sampah Bersumber dari Darat;
- Pengelolaan Sampah di Pesisir dan Laut;
- Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- Penelitian dan Pengembangan

5 Langkah yang dilakukan Kemenko Marves

- Assesment terhadap hotspot dari marine plastic debris dan kota dari sumber sampah tersebut;
- Design kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada leakage sampah ke lautan;
- Pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut;
- Pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan, serta
- Pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.

Capaian presentase pengurangan sampah laut tahun 2023 sebesar 37,74% yang terdiri dari 349.661 ton berasal dari sampah darat dan 33.675ton berasal dari sampah laut,

Jumlah kebocoran sampah laut berkurang 37,74%* sejak 2018 - 2023



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Jumlah	615.674,63	566.074,94	521.540,67	437.382,46	398.000,15	383,336

Percepatan capaian presentase pengurangan 70% kebocoran tahun 2025 dapat ditempuh dengan berbagai strategi.

- Meningkatkan tingkat pengumpulan sampah
- Meningkatkan pelarangan penggunaan plastic sekali pakai atau turunannya di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Menerapkan skenario extended Prodecer responsibility (EPR) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk produsen;
- Meningkatkan pengelolaan sampah di kapal penumpang dan Pelabuhan;
- Mengintegrasikan seluruh platform data dan monitoring persampahan.
- Menggencarkan kegiatan edukasi dan penyadartahuan publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat.

Capaian lainnya

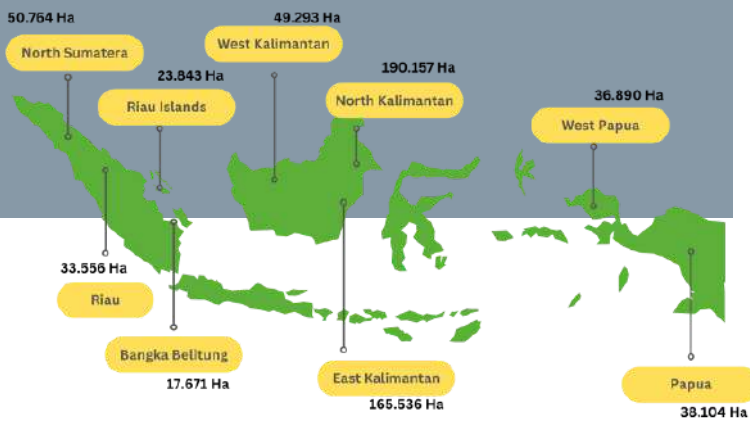
- Kolaborasi dengan Sungai Watch untuk penanganan sampah di sungai dengan jaring sampah di Bali
- Disusun Record of Discussion (RoD) antara Kemenko Marvesi dengan KOICA untuk implementasi penanganan sampah dengan metode jaring sampah dan capacity building di Kab. Tangerang.
- 105 jaring sampah telah terpasang di Bali dan berhasil mengangkat 350 ton sampah plastik

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL

Program rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 11.250 hektar. Pemerintah melalui Kemenko Marves menetapkan target merehabilitasi 600.000 hektar mangrove pada tahun 2024.

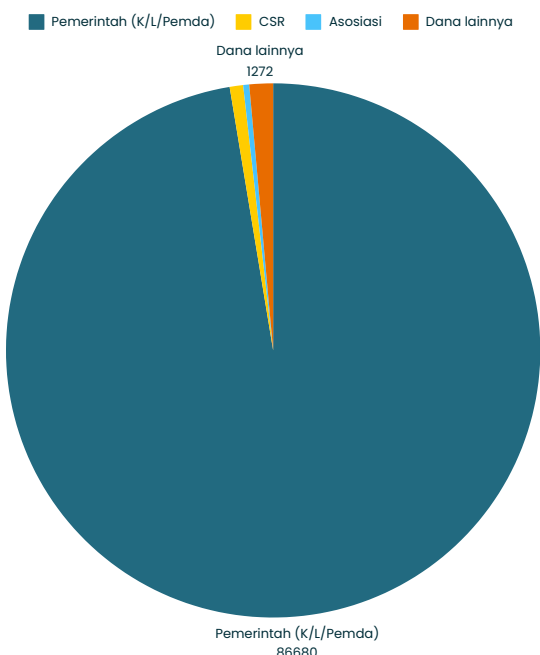


Target rehabilitasi mangrove di 9 Provinsi



Data World Bank, Indonesia memiliki setidaknya 3,5 juta hektar mangrove, 23% dari total seluruh populasi mangrove di dunia, dengan persebarannya dalam 92 spesies. Populasi mangrove tersebut dapat membantu mengatasi dampak dari setidaknya 3,1 miliar ton karbon, setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 2,5 miliar kendaraan bermotor. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi mangrove terbesar di dunia.

Realisasi Rehabilitasi



*) Rehabilitasi tahun 2020 – 2023 telah terlaksana sebesar 88.000 Ha

Mangrove merupakan ekosistem penting di kawasan pesisir. Selain memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dan habitat bagi berbagai spesies, mangrove juga memiliki potensi besar untuk menyerap karbon.

Indonesia memandang penting untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu solusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui konsep Nature Based Solution atau Ecological Based Approach in efforts to mitigate climate change. Upaya Indonesia dalam menjaga ekosistem mangrove melalui rehabilitasi dan konservasi telah diapresiasi oleh dunia dan telah menjadi isu penting pada gelaran UNFCCC dan COP-28 Dubai.





Kemenno Marves dalam upaya pengelolaan mangrove menyelenggarakan:

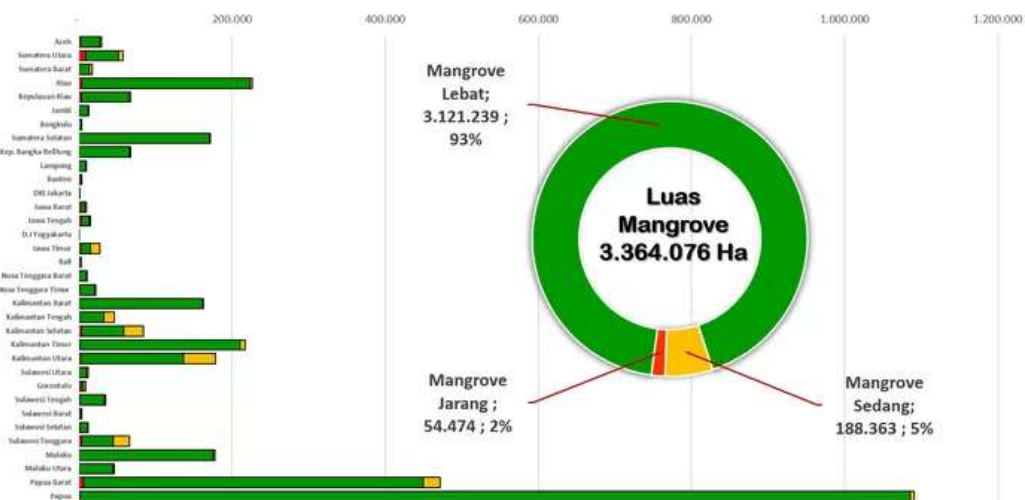
- Aksi bersih sampah plastik dan penanaman mangrove di Kawasan Tahura Denpasar. Kawasan Tahura Mangrove di Bali ini merupakan salah satu contoh baik pengelolaan mangrove di Indonesia.
- Penyerahan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Segara Gunabatu Lumbang Kota Denpasar.
- Program penanaman mangrove di Jakarta Mangrove Ecotourism Centre Pantai Indah Kapuk. Penanaman mangrove ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Islands Hackathon

Kontribusi yang dilakukan dapat berimplikasi langsung terhadap SDG 12 (Responsible Production and Consumption) dan SDG 14 (Life Below Water), serta berdampak pada ekosistem.



KONDISI DAN SEBARAN MANGROVE INDONESIA

Peta Mangrove Nasional, 2021



sumber: KKP.go.id

PENURUNAN EMISI GRK

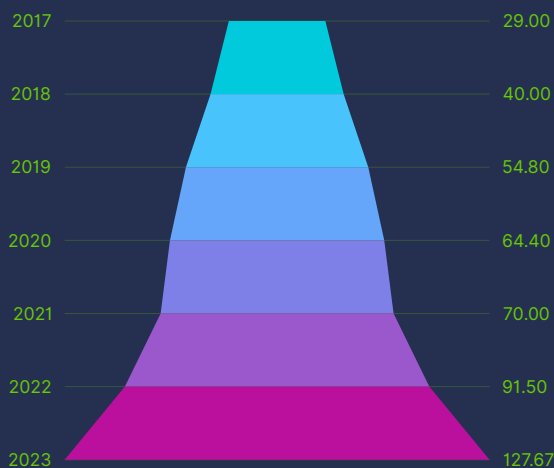
Untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060, Pemerintah melakukan beberapa aksi mitigasi sektor energi berkaitan dengan penurunan GRK ini dengan mengimplementasi EBT, aplikasi efisiensi energi, dan penerapan bahan bakar rendah karbon (gas alam), dan penggunaan teknologi yang pembangkit bersih.

**Realisasi penurunan emisi GRK
Sektor Energi tahun 2023
sebesar 127,67 melebihi target
sebesar 116 juta ton CO₂**



Capaian penurunan emisi menorehkan catatan positif. Setelah mencapai 127,67 juta ton pada tahun 2023, Pemerintah menargetkan 142 juta ton pada tahun 2024.

Pemerintah mematok target pengurangan gas rumah kaca (GRK) menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan negara lain sesuai penetapan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) pada tahun 2030.



Sumber: KemESDM, 2023

Peningkatan atas penurunan GRK, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan, Tahun 2017 realisasi penurunan GRK mencapai 29 juta ton, 2018 sebesar 40 juta ton, tahun 2019 sebesar 54,8 juta ton, 2020 sebesar 64,4 juta ton, tahun 2021 sebesar 70 juta ton, tahun 2022 sebesar 91,5 juta ton dan tahun 2023 penurunan GRK mencapai 127,67 juta ton.

Untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060, Kememnko Marves akan mentoring K/L/stakeholder lainnya untuk melakukan beberapa aksi mitigasi sektor energi berkaitan dengan penurunan GRK ini dengan mengimplementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), aplikasi efisiensi energi, dan penerapan bahan bakar rendah karbon (gas alam), dan penggunaan teknologi yang pembangkit bersih.

PEMANFAATAN FABA



Dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, telah diatur bahwa pengelolaan limbah harus melaksanakan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle oleh penghasil atau jasa pengolah atas seluruh jenis limbah baik limbah kategori limbah B3 ataupun limbah nonB3 yang meliputi upaya pengurangan limbah atau waste minimization.

perlu adanya
tindakan cermat
untuk
penanganannya agar
FABA dapat dipakai
sebagai sumber
material konstruksi



FABA itu adalah sisa pembakaran dari PLTU yang tiap tahun akan berkembang, jika tidak berani untuk melakukan pemberdayaan soal FABA maka akan jadi masalah lingkungan, tidak hanya lingkungan tapi hal tersebut juga berpengaruh pada sisi ekonomi, sehingga perlu adanya tindakan cermat untuk penanganannya agar FABA dapat dipakai sebagai sumber material konstruksi.

Kelangkaan material konstruksi mendorong pemerintah untuk terus berupaya memberdayakan pemanfaatan sisa pembakaran batubara. Kemenko Marves mendorong agar FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) masuk pada material konstruksi jalan tol. FABA bisa dioptimalkan untuk bahan penunjang infrastruktur seperti jalan, conblock, bahan bangunan hingga semen.

Kemenko Marves juga mendorong media tumbuh karang menggunakan FABA, Faktanya adalah media tumbuh karang menggunakan FABA lebih cepat tumbuh jika dibandingkan dengan semen biasa, dampaknya program ini dapat memperbaharui ekosistem laut.

PENANGANAN 15 DANAU PRIORITAS
















Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Penetapan Danau Prioritas Nasional dilakukan berdasarkan kriteria: mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau, pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Danau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Saat ini, beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan punahnya jenis biota endemik.

Tujuannya pelaksanaan program yakni meningkatkan nilai indeks kualitas air sebesar 55,50 pada tahun 2024, mengkoordinasikan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional yang telah mengalami degradasi sehingga mengancam kelestarian danau-danau tersebut, serta kesejahteraan masyarakat.

15 DANAU PRIORITAS NASIONAL

- | | |
|--|--|
|  Danau Toba, Sumut |  Danau Singkarak, Sumbar |
|  Danau Kerinci, Jambi |  Danau Rawapening, Jateng |
|  Danau Batur, Bali |  Danau Tempe, Sulsel |
|  Rawa Danau, Banten |  Danau Matano, Sulsel |
|  Danau Poso, Sulteng |  Danau Limboto, Gorontalo |
|  Danau Tondano, Sulut |  Danau Sentarum, Kalbar |
|  Danau Maninjau, Sumbar |  Danau Sentani, Papua |
| |  Danau Semayang, Melintang, Jempang, Kaltim |

Sumber: RPJMN 2015-2019



DANAU DALAM ANGKA

Berapa jumlah dan luas danau di Indonesia?

840

Indonesia memiliki **840 danau** dengan tipologi sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami.

7.103

Total luas seluruh danau mencapai **7.103 km²**. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua.



FOOD ESTATE



Sejak 2020, Pemerintah menetapkan Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, NTT, dan Sumatera Selatan sebagai lokasi prioritas pengembangan food estate.

Kemenko Marves dan pemerintah daerah Humbahas fokus untuk mengembangkan komoditas cabai untuk produksi secara masif di Food Estate Humbahas.



Food Estate Humbahas telah diolah sejak tahun 2022 dan berfokus pada tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, dan cabai. Di bulan Juni 2023, total akumulasi luas tanam di Food Estate Humbahas telah mencapai 482,84 hektare. Lumbung pangan ini tersebar di 4 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat.



Data Pemerintah Daerah Kabupaten Humbahas, total produksi Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencapai 392 ton kentang dan 165 ton bawang merah, kubis sebesar 294 ton, cabai sebesar 271 ton, jagung sebesar 93 ton, tomat sebesar 26 ton, dan bawang putih sebesar 13 ton.

Tahun pertama bisa menekan impor, tahun kedua produksi sudah membaik, dan tahun ketiga paling lambat sudah swasembada.

TSTH

Taman Sains dan Teknologi Herbal

Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 500 Ha. Tahap 1 telah terbangun 11 bangunan dan pada tahap 2 direncanakan untuk dibangun 14 bangunan tersisa. TSTH2 akan menjadi aset Kemendikbudristek yang dioperasikan oleh IT-Del



Strategi pengembangan:

- Pengembangan Sains dan Teknologi Genomik untuk hortikultura dan tanaman herbal Indonesia melalui kerja sama riset dengan mitra dalam dan luar negeri inkubasi teknologi untuk melahirkan start-up.
- Menjadi “hub” dan akselerator riset serta “etalase” potensi hortikultura dan tanaman herbal Indonesia;
- Melakukan “teaching industry” untuk perguruan tinggi dan lembaga terkait;
- Melakukan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Gedung Riset Pertanian  Luas Bangunan : 1990.2 m ²	Gedung Riset Herbal  Luas Bangunan : 1990.2 m ²	Greenhouse  Luas Bangunan : 2457.6 m ²	Screenhouse  Luas Bangunan : 2457.6 m ²
Dua Mess Karyawan  Luas Bangunan : @431.23 m ²	Gedung Utilitas Riset  Luas Bangunan : 372.75 m ²	Rumah Kontrol Pertanian  Luas Bangunan : 192 m ²	LAB. IPA – RUMAH JAGA - RESERVOI  Luas Bangunan : 54, 25 dan 259.75 m ²

PENANGANAN DAS CITARUM



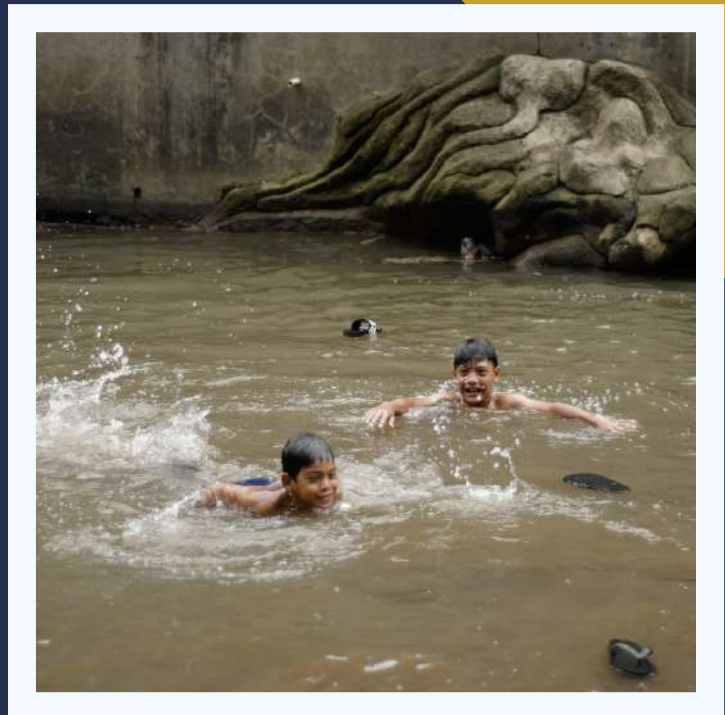
Penanganan Citarum harus terstruktur, sistematis dan masiv serta diperlukan total action bersama sesuai dengan kearifan lokal. Unsur pemerintah pusat dan daerah selaku pemangku tugas utama yang memiliki kebijakan, anggaran dan program harus berperan lebih signifikan, mau dan mampu mengajak unsur lainnya yaitu akademisi, komunitas, media dan unsur bisnis secara lebih substantif tidak sekedar asesories atau objek belaka. Perlu dilibatkan lebih substantif termasuk difasilitasi agar mampu berperan optimal.

Penanganan DAS Citarum berdasarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 mengenai Percepatan Pengendalian Kerusakan Daerah Aliran Sungai (PPK DAS) Citarum,

Indeks Kualitas Air di DAS Citarum Tahun 2023 menjadi 60 poin

Peran Kemenko Marves

- Berhasil mendorong Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai Ultimate Goals Kegiatan PPK DAS Citarum tahun 2022 yaitu sebesar 51,01 Poin atau meningkat sebesar 0,88 poin dari capaian IKA tahun 2021 pada 258 titik pantau,
- Mendorong upaya untuk mempercepat kenaikan IKA sesuai target tahun 2022 yakni 57 poin.
- Menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.



BIDANG

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan 5 DPSP

Pemerintah ingin mewujudkan 10 Bali Baru melalui program pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang merupakan salah satu . 10 DPP tersebut merupakan Major Project sebagai salah satu agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Dalam mengedepankan fokus pembangunan pariwisata di lima tahun berjalan, ditetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Lima DPSP tersebut merupakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas 15 September 2019.



Perlu dilakukan langkah-langkah percepatan penanganan isu-isu pengembangan lima DPSP. Kemenko Marves telah melakukan penyelesaian 101 isu pengembangan DPSP.

Peran Kemenko Marves:

DANAU TOBA

Penyelenggaraan FI Powerboat di danau toba merupakan event olahraga internasional pertama di danau toba.

Pelaksanaan event internasional di DPSP Danau Toba yang memberikan peningkatan dampak ekonomi lokal. Secara total, perkiraan dampak ekonomi penyelenggaraan event internasional FI Powerboat Danau Toba mencapai Rp391 miliar.



5 DPSP

#2



LABUAN BAJO

- Percepatan pengembangan lahan otorita BPOLBF
- Percepatan investasi di DPSP Labuan Bajo
- Percepatan pengembangan SDM dan tata kelola pariwisata



BOROBUDUR

- Integrasi pengelolaan Kawasan Borobudur (optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan zona 3,4, dan 5)
- Pengaturan pengunjung ke Kawasan Borobudur
- Percepatan pengembangan lahan otorita BPOB
- Sidang Extended 45th Session of the World Heritage Committee (WHC)

5 DPSP

#3



lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. In pretium massa varius massa vestibulum sodales. Integer pellentesque et leo tempor porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

LIKUPANG

- Pembangunan infrastruktur dan pengembangan atraksi
- Perkembangan pembangunan pelabuhan dan penyelesaian zona ranjau di perairan Pulau Bangka
- Penyelenggaraan Likupang Tourism Festival (LTF) 2023.
- Desa Kahuku dipilih menjadi lokasi pembangunan pelabuhan multipurpose di Pulau Bangka



MANDALIKA

- Pengembangan 7 desa wisata di Kawasan Mandalika
- Pengembangan kapasitas usaha kecil menengah di 7 desa wisata
- Penanganan isu sedimentasi
- Gelaran MotoGP, WSBK, Shell Eco-marathon regional Asia Pasific dan Timur

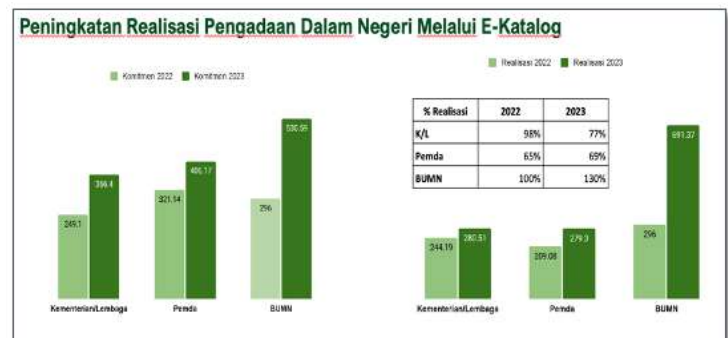
Gerakan #BBI

#Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020. selain itu juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Gernas BBI memperluas cakupan dengan mengaktivasi Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).



6 capaian besar Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan program Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah.

- Nilai realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan BUMN mencapai Rp 762,7 Triliun
- Jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk.
- Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik
- Integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan.
- Implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun.
- Komitmen belanja tahun 2023 sebesar Rp 1.303 triliun, meningkat 50% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 866 triliun.



#BBWI

GIM *Lokal*

Maraknya permainan gim yang dikonsumsi masyarakat menjadikan industri gim sebagai industri konten terbesar di dunia dengan pendapatan global lebih dari 3.000 triliun. Nilai ini 330 persen lebih besar dari industri film.

Industri gim nasional mempunyai tantangan berupa pengembang lokal yang hanya menguasai 0,5 persen pasar nasional.

Pangsa pasar dari game nasional, termasuk game esport, masih didominasi oleh game-game luar negeri.

Sebesar 99,5 persen atau setara lebih dari 1,7 miliar dolar AS pada 2020. Tahun 2025 sudah diproyeksikan bahwa pasar game Indonesia akan bisa mencapai 2 miliar dolar AS.



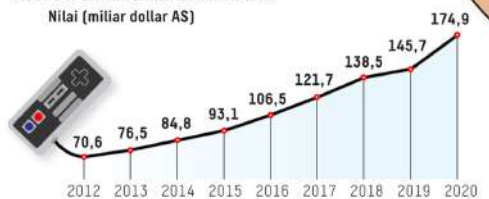
pelatihan kepada tenaga pengajar (Training of Trainer) dari tingkat vokasi hingga perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dosen, guru, dan siswa. Talenta-talenta nasional terbaik juga dilibatkan dalam co-production flagship game yang diinisiasi oleh Asosiasi CAKRA dan Chungkang College of Cultural Industries di tahun 2023 ini.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan mengembangkan industri game lokal. Strateginya dengan melibatkan berbagai pihak.

Nilai Penjualan Gim di Dunia Berdasar Platform (2020)



Nilai Perolehan Industri Gim Dunia



Perolehan Industri Gim Dunia Berdasar Wilayah (2020)



*Data hingga November 2020

Sumber: Newzoo dan IGFPC, Diolah Litbang Kompas/RN

ENJOYGAMES, BISMARUHI



INDONESIA

Spice Up The World

Indonesia Spice Up The World adalah sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan dan investasi melalui industri gastronomi.



BUMBU INDONESIA MENDUNIA

Indonesia Spice Up The World adalah sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan dan investasi melalui industri gastronomi. Saat ini, gerakan ini dikordinasikan oleh Kementerian Kordinasi Maritim dan Investasi.

Digodok sejak Bulan Juni 2020 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Asosiasi, Pemerintah dan Media), program ini diluncurkan di Dubai World Expo Oktober 2020



PENGENDALIAN *Geopark*

Indonesia menjadi negara dengan UNESCO Global Geopark terbanyak di Asia Tenggara. Saat ini, terdapat enam UNESCO Global Geopark yang tersebar di Sumatera Utara, Belitung, Jawa Barat, NTB, dan Bali.

Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pengembangan geopark sebagai destinasi berkelanjutan melalui (a) konservasi, (b) edukasi, dan (c) pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kemenko Marves berkomitmen untuk terus mensukseskan pengembangan geopark di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah UNESCO Global Geopark terbanyak di Asia Tenggara atau posisi ke-8 dari 44 negara dengan geopark sedunia yang berjumlah total 169 UNESCO Global Geopark (UGGp) sedunia.

Indonesia baru memiliki 13 geopark nasional dan 6 UGGp. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Salah satu targetnya adalah untuk mewujudkan 12 destinasi pariwisata global geopark sehingga penting untuk merawatnya sebagai bentuk keseimbangan konservasi lingkungan dan pemanfaatan.






Geopark Indonesia yang Mendunia

Hingga 2021, sudah ada 6 geopark di Indonesia telah diakui sebagai kawasan geopark dunia karena keunikan geologis, biologis, dan budayanya. Apa saja?

<p>1. Geopark Batur</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2012 • Punya 21 situs warisan alam 	<p>2. Geopark Ciletuh</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2018 • Mencakup 8 kecamatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi
<p>3. Geopark Belitung</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2021 • Punya 17 situs warisan alam • Punya keterkaitan geologis, biologis, dan budaya yang kuat. 	<p>4. Geopark Pegunungan Sewu</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2015 • Punya 33 situs warisan alam • Kawasan karst terpanjang di Jawa (40.000 bukit karst)
<p>5. Geopark Gn. Rinjani</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2018 • Punya keragaman flora fauna yang sebagian besar endemik 	<p>6. Geopark Danau Toba</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Diakui sejak 2020 • Punya bentang alam beragam



Riset: Fisi o, Grafis: Anando



AFIRMASI

Produk Dalam Negeri

Aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri atau PDN selama dua tahun terakhir telah berjalan dengan baik. Menurut laporan LKPP dan Kementerian BUMN, realisasi belanja PDN meningkat 80% dari 749,5 triliun pada 2022, menjadi 1.349,8 triliun pada 2023.

6 (enam) capaian besar Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah.

Nilai realisasi belanja dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp762,7 Triliun. Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonomi di kisaran 1% yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%.

- Jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk, melebihi target 1 juta.
- Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada Agustus 2022
- integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan
- Implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp1,8 Triliun.
- mengajak masyarakat berwisata di Indonesia, telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar Rp1,2 sampai Rp1,4 Miliar perjalanan.



Aksi Afirmasi BBI melalui belanja PDN ini merupakan legasi yang baik dan luhur bagi Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

SPBE

Pembangunan pemerintahan yang efisien dan efektif merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekturnya. Menko Luhut berbicara bahwa Indonesia memiliki empat pilar ekonomi, yakni hilirisasi, digitalisasi, dana desa, dan harga komoditi. Ia menekankan bahwa digitalisasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi menjadi satu aplikasi untuk Indonesia.

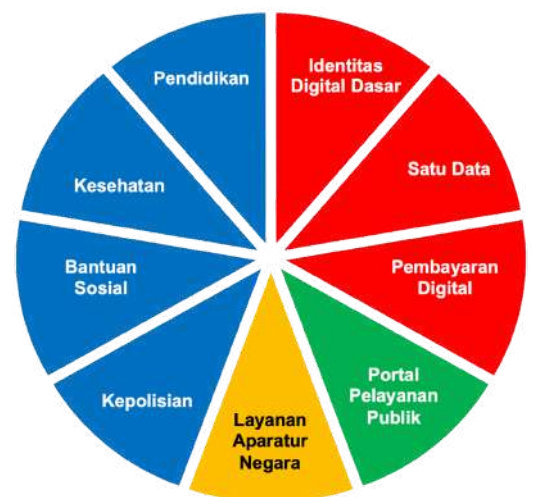


9 Fokus Sistem Prioritas dan Pembentukan GovTech Menjadi Kunci Percepatan dan Keberlanjutan Pemerintahan Digital

SPBE adalah terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam hal ini, kesederhanaan adalah kunci, baik pada kesederhanaan aturan, proses, dan aplikasi. Setiap unsur layanan haruslah berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha. Menko Luhut menjelaskan salah satunya melalui digitalisasi lewat adanya e-katalog.

E-katalog ada 105 miliar dollar atau Rp1.600 triliun yang selama ini dimpor hampir 90%. Sekarang bertahap mulai tahun 2023, sudah mulai dimasukan e-katalog itu sudah 400 triliun rupiah tahun lalu.

Untuk mempercepat implementasi SPBE di 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves, SPBE harus menciptakan layanan yang bersifat citizen centric di mana seluruh proses dan hasil layanan harus berorientasi kepada kepentingan warga negara dan mudah digunakan. Perlu adanya standarisasi data dan interoperabilitas penuh antar semua aplikasi baik intra maupun antar K/L untuk memastikan SPBE dapat berjalan secara terintegrasi menyeluruh.



Biru: Layanan Publik Terintegrasi

Merah: Infrastruktur Publik Digital (DPI)

Kuning dan Hijau : Portal Nasional (Portal Layanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan)

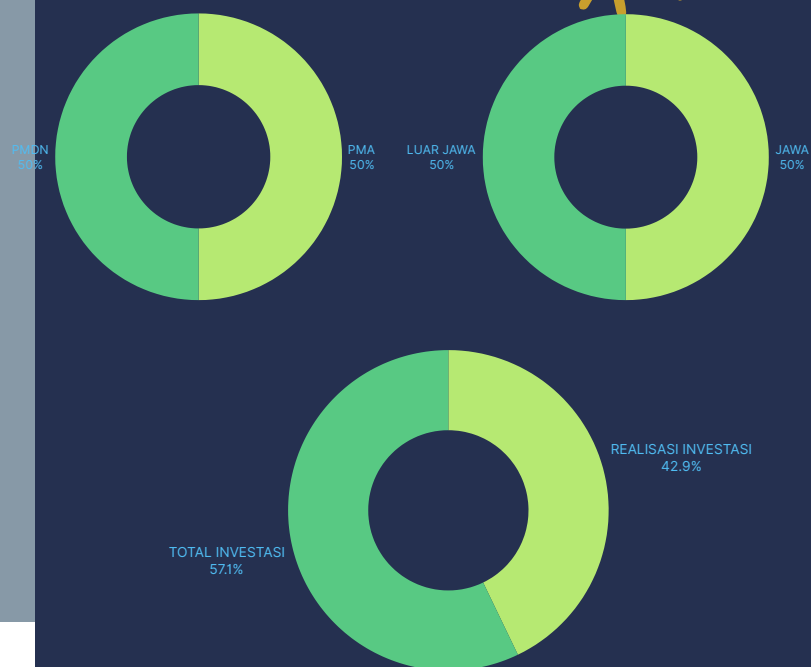
BIDANG

INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang investasi dan pertambangan

Realisasi INVESTASI

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong peningkatan investasi, agar tidak ada disparitas investasi antara Jawa dan Luar Jawa. Berdasarkan rilis dari K/L teknis bahwa realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp..... Trilyun (Periode Januari s.d Desember 2023) (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan). Investasi Luar Jawa sebesar Rp..... T (.....%), sedangkan Pulau Jawa Rp..... T (.....%), dari data tersebut terlihat bahwa investasi lebih besar di Luar Jawa, hal ini menunjukkan tidak adanya disparitas investasi yang cukup besar antara Jawa dan Luar Jawa.



HILIRISASI Industri



TRANSFORMASI EKONOMI

Kinerja Ekonomi Didukung oleh Transformasi Ekonomi Indonesia Melalui Program Hilirisasi: Indonesia Tidak Lagi Mengandalkan Komoditas Mentah

Ekspor Produk Turunan Nikel Indonesia (USD Miliar)



TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA MELALUI PROGRAM HILIRISASI



PDB KEMARITIMAN

PDB Kemaritiman periode didasarkan pada framework Ocean Accounts tahun 2019 dimana tersusun 12 cluster dengan total cakupan 374 KBLI, dengan menggunakan framework yang sudah terstandarisasi secara internasional.

PDB Kemaritiman merupakan kondisi ketika pengelolaan semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di daratan lahan atas yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan yang kuat sebagai penggerak perekonomian nasional telah terwujud.

PDB Kemaritiman adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim. PDB Kemaritiman sebagai salah satu pilot project Satu Data Indonesia hal ini tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia).

Kontribusi PDB Kemaritiman (%) Tahun 2018-2022 sebesar 7,92%. Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan PDB Kemaritiman mengikuti tren pertumbuhan PDB Nasional.

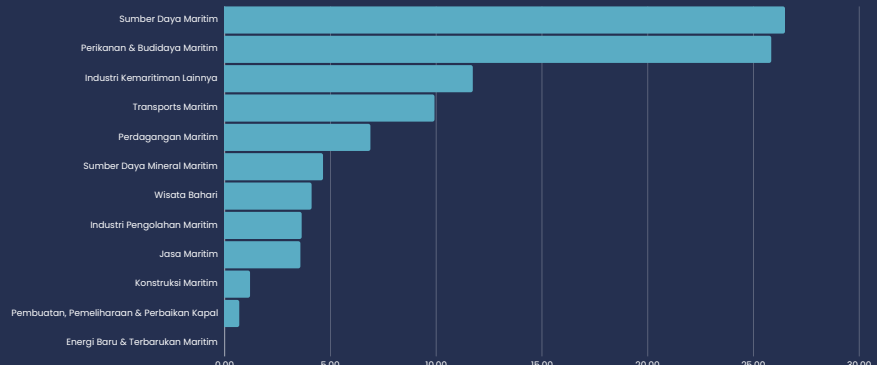
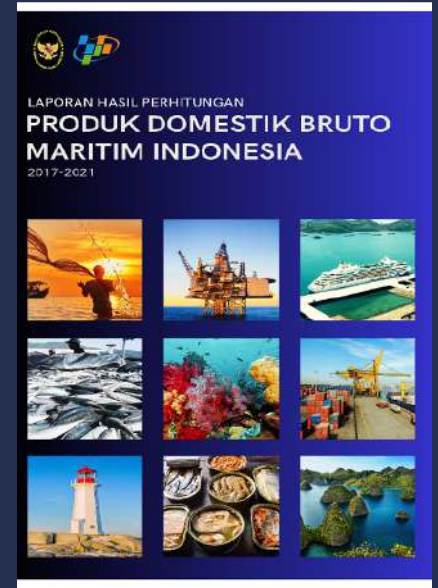
PDB Kemaritiman periode didasarkan pada framework Ocean Accounts tahun 2019 dimana tersusun 12 cluster dengan total cakupan 374 KBLI, dengan menggunakan framework yang sudah terstandarisasi secara internasional

"nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim."

Target Realisasi

7,7%

7,92%



SATGAS TATA KELOLA SAWIT



Tahun 2022 terdapat kelangkaan minyak goreng secara nasional yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan tugas dari Presiden untuk memitigasi permasalahan tersebut. Untuk menjalankan arahan dari Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit industri kelapa sawit.

Desember 2022, hasil audit BPKP menyatakan bahwa untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara sistematis, diperlukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Pada bulan April 2023, Presiden secara resmi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas) melalui Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2023.

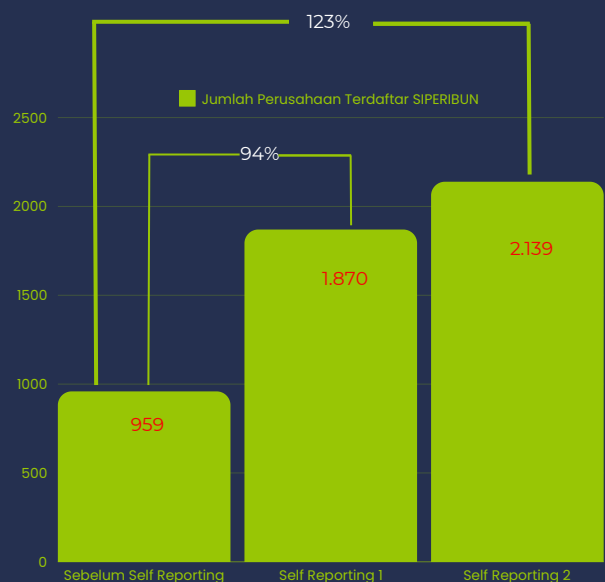
Lingkup pekerjaan Satgas:

- Perbaikan Tata Kelola Perizinan
- Penegakkan PNPB dan Denda Sawit dalam KH
- Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat
- Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat
- Peningkatan Produktivitas
- Plasma
- Digitalisasi Komoditas Kelapa Sawit dari Hulu ke Hilir

Satgas bekerja mulai 14 April 2023 sampai 30 September 2023. Dampak yang dirasakan apabila program ini berjalan:

- pemulihan hak negara yang berasal dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (+/- 4-30 Triliun);
- peningkatan tata kelola industri sawit / rencana zonasi

Inovasi untuk memantau dan mengawasi perkembangan lahan sawit di Indonesia, mengimplementasikan sistem pelaporan mandiri (selfreporting) melalui Sistem Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan (SIPERIBUN).



Perlu dilakukan Self Reporting oleh Perusahaan. Adapun kegiatan Self Reporting sendiri bertujuan untuk pengumpulan data dan pengambilan kebijakan berdasarkan data yang terkumpul.

Setelah melakukan analisa, platform Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dapat digunakan sebagai pusat pengumpulan dari data-data yang dimiliki perusahaan.

Self Reporting ini telah meningkatkan pelaporan dari yang sebelumnya hanya 959 perusahaan, menjadi 2.139 perusahaan yang melaporkan kondisi lahan dan perizinannya dalam platform tersebut.

Peningkatan pelaporan juga hampir terjadi di seluruh Provinsi se-Indonesia. Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur menjadi Provinsi dengan Perusahaan Sawit terdaftar terbanyak.

Self Reporting tersebut, berhasil mengumpulkan data perizinan perusahaan yang berupa Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Hak Guna Usaha. Adapun hasil dari Self Reporting 1 dan Self Reporting 2, terdapat konfirmasi luas Izin Lokasi seluas 18 juta Ha; Izin Usaha Perkebunan seluas 16,3 juta Ha; dan Hak Guna Usaha seluas 8,1 juta Ha.



Data Awal Satgas

Izin Lokasi

23,5
Juta Ha

Izin Usaha
Perkebunan

20,4
Juta Ha

Luasan Masing-
masing Perizinan
(data BPKP)

Hak Guna
Usaha

8,8
Juta Ha



Setelah Self Reporting

Izin Lokasi

18,5
Juta Ha

Izin Usaha
Perkebunan

16,3
Juta Ha

Luasan Masing-
masing Perizinan
(data dari 2.140
Perusahaan)

Hak Guna
Usaha

8,1
Juta Ha

- Seluruh luas tutupan kelapa sawit tahun 2023 adalah 17.32 Juta Ha, mengalami penambahan sekitar 500.000 Ha dari tahun 2021 (identifikasi citra satelit, BIG)
- Data terakhir potensi penerimaan penyelesaian SK Tagih Pembayaran PSDH-DR dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam Kawasan hutan Pasal 110A UUCK sebesar 1.7 Triliun.
- Potensi penerimaan dari Pembayaran Sanksi Administratif sebanyak 1,18 Triliun. (data 29 Desember 2023), realisasi tagihan pembayaran PSDH-DR Pasal 110A sebesar 114,3 Miliar.

Tindak lanjut tahun 2024:

- Kementerian/Lembaga memiliki Single Source Of Truth data sawit rakyat
- Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kawasan Hutan secara spasial
- Perbaikan regulasi sehingga tidak tumpang tindih terhadap Fasilitas
- Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)
- Meningkatnya realisasi peremajaan sawit rakyat
- Mewujudkan digitalisasi tata kelola industri kelapa sawit
- Koordinasi Pendataan Sawit Rakyat,
- Koordinasi Perbaikan Regulasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat,
- Koordinasi Peningkatan kepatuhan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat,
- Koordinasi Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat.

PEMBANGUNAN PELABUHAN KUALA TANJUNG



Sesuai rencana awal, Pelabuhan Kuala Tanjung akan diintegrasikan dengan kawasan industri dan telah diatur sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Perpres No. 56 tahun 2018, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan 2 (dua) Proyek Strategis Nasional, dan akan dikembangkan secara terintegrasi sesuai hasil studi yang telah dilakukan.

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah ditetapkan dengan Kepmenhub No KP 148 tahun 2016 tersebut akan menjadi acuan pembangunan, pengembangan dan operasional pelabuhan pada jangka pendek (2017-2021), jangka menengah (2017-2026) dan jangka panjang (2017-2036).

Pelabuhan ini ditargetkan menjadi hub bongkar muat barang untuk pasar domestik kapal-kapal ber-tonase besar, yang selama ini selalu bersandar di Pelabuhan Klang, Malaysia dan Singapura, serta.

Fungsi utama Pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai pelabuhan transshipment sebagaimana Pelabuhan Singapura dan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Akan dilakukan finalisasi struktur untuk Kawasan Industri seperti yang sudah di diskusikan sebelumnya, untuk kemudian struktur final akan dikirimkan kepada pihak Zhejiang dan PoR. Untuk memperkuat positioning Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hub International.

Direncanakan pembangunan industrial port untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung seperti steel, petrochemical, fertilizer, CPO/agro-businesses, dan lain sebagainya.

SIMBARA

SISTEM INFORMASI MINERAL BATUBARA

SIMBARA telah berjalan dengan baik dan telah memberikan kontribusi dalam analisis pergerakan komoditas batubara, serta komoditas timah sejak dimandatorikan pada 31 Oktober 2022.

Simbara mampu menutup celah korupsi. Artinya, hal ini bisa mendorong penerimaan terhadap negara dari sektor Minerba.

Pengembangan Simbara telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru, penggunaan blokir otomatis dan pengenaan batu bara di titik mana saja ketika ditemukan dokumen yang tidak konsisten telah nyata jadi upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik.

Saat ini sistem Validasi Kuota NTPN sudah diterapkan, sosialisasi ke Pelaku Usaha dan Lauching pada Oktober 2023. Revisi Rancangan Perpres SIMBARA atas rapat klarifikasi permohonan izin Prakarsa.

Kedepannya, iklim usaha di sektor minerba dalam negeri akan semakin tertib dan akan memberikan perkembangan yang positif.

Simbara akan meningkatkan pengawasan, sehingga bisa menjadi dasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Misalnya, pada aspek memenuhi Domestic Market Obligation (DMO), pembayaran royalti, dan pemberantasan penambang tanpa izin atau penambangan secara ilegal.



KCJB

Whoosh

Diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023.

kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini dinamakan "Whoosh". merupakan cerminan dari waktu operasi optimal sistem hebat.

Dampak:

- Beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga Meningkatkan konektivitas antara Kota Jakarta dan Bandung serta mengurangi tingkat kemacetan
- Waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi lebih singkat dengan waktu kurang lebih 50 Menit.

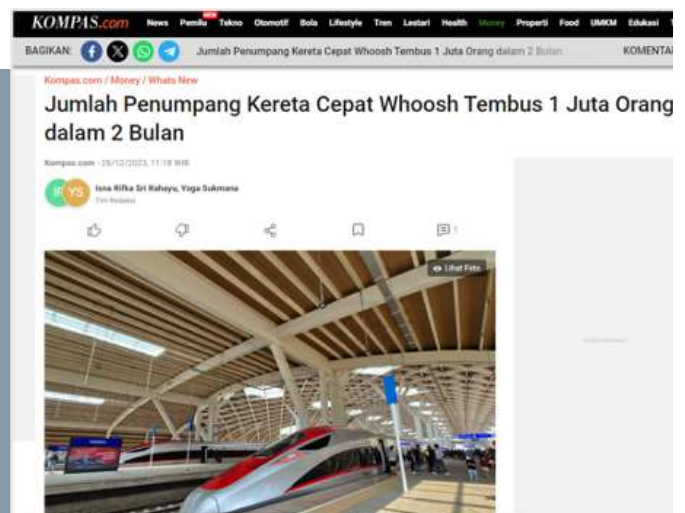


Capaian tahun 2023 antara lain:

- Tersambungny seluruh jalur KCJB oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan di Stasiun KCJB Halim. Terdapat total sebanyak 304 km rel yang telah terpasang meliputi jalur ganda seluruh trase KCJB sejauh 142,3 km, rel di 4 stasiun KCJB, dan Depo Tegalluar.
- Pengendalian percepatan pembangunan konstruksi. Progres konstruksi KCJB saat ini telah mencapai 86% sesuai hasil verifikasi para konsultan. Saat ini pembangunan stasiun yang sebagian besar sudah di atas 90% akan terus disebut menjelang operasional KCJB.

Peran Marves:

- Membentuk dan menetapkan Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanggal 21 Juni 2022
- Menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban Perusahaan Patungan BUMN apabila terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya [cost overrun]



FINANSIAL

Achievement:

- 17% Interim Payment Ke-40 telah dibayarkan
- Drawdown ke-12 telah terealisasi sebesar USD 34 Million per September 2023.

Critical Points:

- Outstanding 2 CS yang perlu diselesaikan.

Points of Concern:

- Cost Overrun Pemenuhan 25% Pendanaan Cost
- Overrun telah dipenuhi oleh Pemegang Saham, selanjutnya 75% Pendanaan Cost Overrun akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pemegang Saham
- Review Feasibility Study & Financial Model KCIC telah menyampaikan Dokumen Reviu FS ke Para Pemegang Saham, MoT dan juga Sponsor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
- Penyesuaian Masa Konsesi telah dikirimkan proposal penyesuaian masa konsesi ke MoT, saat ini dalam proses Pembahasan draft amandemen konsesi dengan MoT dan juga LO dari Kejaksaan Agung untuk pengajuan Rp 0,- biaya konsesi, selanjutnya akan dilakukan review oleh BPKP dan ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023.
- Pinjaman Cost Overrun dari CDB Pemerintah Indonesia sedang dalam proses finalisasi skema Pinjaman CDB kepada KCIC melalui PT KAL.
- Interim Payment Ke-41 masih dalam tahap review CDJO.

KONSTRUKSI

Achievement:

- Akses DI Panjaitan Progres pelaksanaan konstruksi sudah open traffic, proses konstruksi sudah selesai dilaksanakan.
- Akses Toll Stasiun Halim ruang lingkup pekerjaan WIKA sudah mencapai 100% dan ruang lingkup pekerjaan Jasa Marga sudah mencapai 100%.
- Jembatan Cibiru Hilir sudah open traffic per Agustus 2023. Pelaksanaan konstruksi sudah selesai dilaksanakan.
- Water Supply sudah beroperasi sejak Oktober 2023.
- Pekerjaan Konstruksi Stasiun Padalarang sudah mencapai 100%.

Critical Points:

- Memorandum of Agreement (MOA) Stasiun Padalarang terkait dengan harga VO Stasiun Padalarang sedang sirkuler tandatangan oleh KCIC, HSRCC dan CDJO.

Points of Concern:

- Pekerjaan Akses Stasiun & Depo agar dapat dimonitor secara ketat.
- Izin Operasi pengujian dan pengurusan dokumen perizinan ditargetkan paling akhir tahun 2023.

O&M Readiness

Achievement:

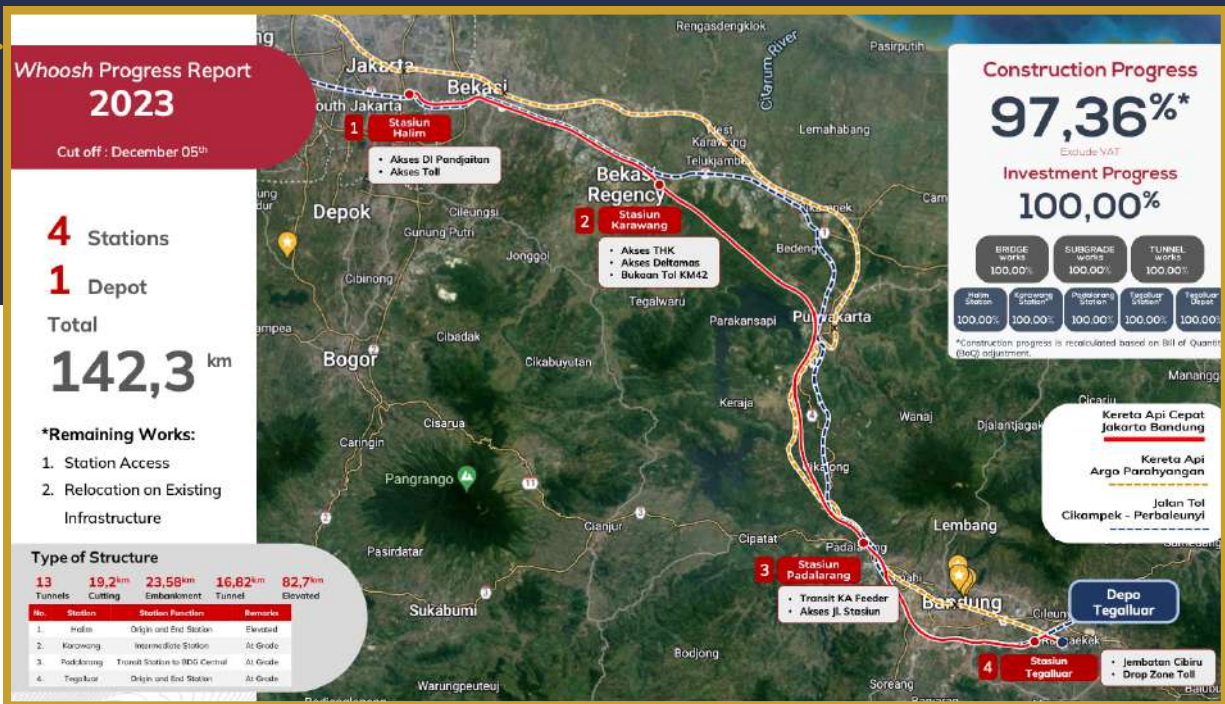
- Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Kementerian Perhubungan sudah mengirimkan surat terkait Pemenuhan Evaluasi dan Verifikasi Dokumen SMKP Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT. KCIC.
- Izin Operasi Sarana KCJB Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana KCJB sudah terbit.
- Izin Usaha Sarana sudah dilakukan pembayaran PNBPNP
- Pengesahan Sistem dan Prosedur No. KP-DJKA 194 Tahun 2023 tentang Pemeriksaan dan Perawatan Level 1 & 2 Sarana (EMU/CIT) sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Sertifikat Uji Pertama Sarana No. KP-DJKA 195 Tahun 2023 sudah diberikan untuk 4 trainset EMU oleh Kementerian Perhubungan.
- Training HSR batch 3 sedang diselenggarakan di PPI Madiun.

Critical Points:

- Uji Pertama Prasarana dalam tahap pengujian.
- O&M Readiness Budget, biaya Personnel Training disepakati untuk peserta training sejumlah 500 personel. Jumlah peserta yang harus mengikuti training sebanyak 600 personel.
- Kontrak OM Konsorsium proses negosiasi dengan pihak Operation and Maintenance Consortium (OMC).

Points of Concern:

- Sertifikasi personel TKA telah terbit 155 smartcard dari DJKA dan sedang proses pengajuan sebanyak 27 smartcard.



PROGRES

Tahun 2023

Overall Progress

Investment 100,00%
(Actual progress claimed by EPC Contractor)

Physical 97,36%
(Actual progress verified by Supervision Consultant)

Infrastructure 92,40% Permit

Rolling Stock 79,20% Permit

Land Acquisition 99,97%
Mainline 99,99 % of 6.582.253 m2
Land for 99,05 % of 134.846 m2
Auxiliary

O&M Readiness 65,65%

Infrastructure* Plan 100,00% Actual 100,00%

Items	Status	Plan	Actual
Subgrade	🟢🟢🟢	100%	100%
Bridge	🟢🟢🟢	100%	100%
Tunnel	🟢🟢🟢	100%	100%
Track laying	🟢🟢🟢	100%	100%
Communications, Signals and Information	🟢🟢🟢	100%	100%
Electric Power and Traction Substation	🟢🟢🟢	100%	100%

O&M Readiness Plan 100,00% Actual 65,65%

Items	Status	Plan	Actual
Drafting of High-Speed Train Regulations	🟢🟢🟢	100%	90%
HR O&M Needs Mapping	🟢🟢🟢	100%	51,20%
Training HSR	🟢🟢🟢	100%	55,15%

Land Acquisition Plan 100,00% Actual 99,97%

Fasos and Fasum Relocation Plan 100,00% Actual 93,52%

Stations & Depot Plan 100,00% Actual 100,00%

Access Work KCIC Plan 100,00% Actual 83,40%

EMU/CIT Shipment Plan 100,00% Actual 100,00%

Access Work External Plan 40,00% Actual 37,86%

Permit Infrastructure Plan 100,00% Actual 92,40%

Testcom & Trial Operation Plan 100,00% Actual 100,00%

Permit EMU Rolling Stock Plan 100,00% Actual 79,20%

Financial Cost Overrun O&M Readiness Budget

*Note: SHD Land has reached 100%, remaining 0,03% of Land Acquisition, still on Administration process.
*Due to changes in the Cooperation scheme changed to a Consortium, mapping of HR needs is in the process of negotiation and the deadline for completing training has changed to 2024, the progress figure is in the process of being recalculated.
**Quantification of licensing progress is in the process of recalculation based on the results of the latest master schedule agreement.

*For Subgrade, Bridge, and Tunnel works, CDJO is currently verifying minor defects.

EMU

Technical Specifications

中国中车 CRRC

CR400AF

CRRC QINGDAO SIFANG

- SIGNALLING** CTCOS-3 CTCOS-2 as backup
- TRAVEL TIMES** 36 - 45 minutes
- DISASTER MONITORING & CONTROL**
 - 7 Earthquake Sensors
 - 17 Wind Sensors
 - 8 Rain Sensors
 - 6 Overpass Sensors
- 142,3 km** Double track
- TRACTION VOLTAGE** Single Phase AC 25 kV/50Hz
- SPEED** Up to 350 km/h

CAPACITY 1 TRAINSET - 8 CARS
First Class, Business Class, Premium Economy and Dining Car

Height 4,05 meters meters

Length 208,95 meters

passengers 601

Rail Gauge 1435 mm

HIGHLY CONFIDENTIAL ©2023 PT VOIC

LRT *Jabodebek*

Mudah & Terintegrasi

Presiden Joko Widodo meresmikan moda transportasi kereta api ringan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) pada, 28 Agustus 2023. LRT sepanjang 41,2 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun.



Pelaksanaan pembangunan LRT Jabodebek berdasarkan:

- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
- Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
- sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

LRT Jabodebek adalah proyek transportasi massal perkotaan berbasis rel yang telah dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya Rp 32,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek ini akan melayani perjalanan lintas wilayah dari stasiun awal Harjamukti (Cibubur Line) sepanjang 14,5 kilometer dan dari stasiun awal Jatimulya (Bekasi Line) sepanjang 18,5 kilometer, menuju stasiun utama Cawang, untuk selanjutnya menuju stasiun akhir Dukuh Atas melalui Cawang Line sepanjang 11,5 kilometer. Panjang keseluruhan sistem LRT Jabodebek ini adalah 44,5 kilometer, dengan 18 stasiun.





KAWASAN INDUSTRI HIJAU

Kaltara

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ditetapkan bahwa Kawasan Industri Tanah Kuning – Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam bagian Proyek Strategis Nasional (PSN).

4 KAWASAN INDUSTRI TANAH KUNING

Terdapat 4 (empat) pengelola PSN Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, dengan luas saat ini 16.400 hektare, dari target 30.000 hektare. Adapun yang telah ditetapkan yaitu:

- PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI);
- PT Kayan Patria Propertindo (KPP);
- PT Indonesia Strategis Industri (ISI);
- PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI).





PENTINGNYA KAWASAN INDUSTRI HIJAU

- Menghasilkan produk hijau berdaya saing tinggi, kecenderungan investor saat ini ingin berinvestasi di sektor hijau, dan aturan dari negara barat yang menseleksi produk tidak ramah lingkungan.
- Membantu Pemerintah Merealisasikan Bauran Energi (Target EBT 2025 sebesar 23%), kawasan Industri akan menggunakan bauran sumber energi hijau: PLTA (Hydro), Biomassa, PLTS
- Menjadi Kawasan Industri yang Menghasilkan Produk2 "Substitusi Impor", sehingga akan menurunkan nilai Impor dan membantu kesehatan neraca dagang Indonesia, berbagai produk petrokimia seperti Bensin Euro V, Solar Euro V, Benzena, Paraksilena, isobutana, Propane. Serta produk-produk hilirisasi lain sehingga menurunkan angka kebutuhan impor
- Membantu Pemerintah Merealisasikan Penurunan Emisi Karbon; 31,89% sendiri, dan 43,20% bantuan internasional pada 2030, menghasilkan produk yang penting bagi target penurunan emisi karbon: Renewable Fuels, New energy battery, electric truck, ternary cathode, smelter aluminium.
- Menjadi Kawasan Industri yang Akan Meningkatkan Nilai Tambah Berbagai SDA Mineral di Indonesia, menjadi motor penggerak hilirisasi berbagai mineral yang banyak terdapat di Indonesia seperti: Nikel, Bauksit, Tembaga, Timah.

PERAN KEMENKO MARVES

- Koordinasi untuk menciptakan kesepakatan timeline target progress oleh berbagai pihak yang menjadi acuan pemantauan perkembangan;
- Koordinasi untuk mencari solusi permasalahan yang menghambat, seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan kesepakatan mekanisme penilaian untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- Mendukung Pembangunan PLTA Mentarang. Proyek ini akan menghasilkan kapasitas listrik sebesar 1,375MW dan nilai investasi sebesar USD 2,6 Juta. Hasil dari PLTA Mentarang akan menjadi sumber energi Listrik PSN Kawasan Industri Tanah Kuning;
- Fasilitasi percepatan hibah aset Kementerian ESDM kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan.



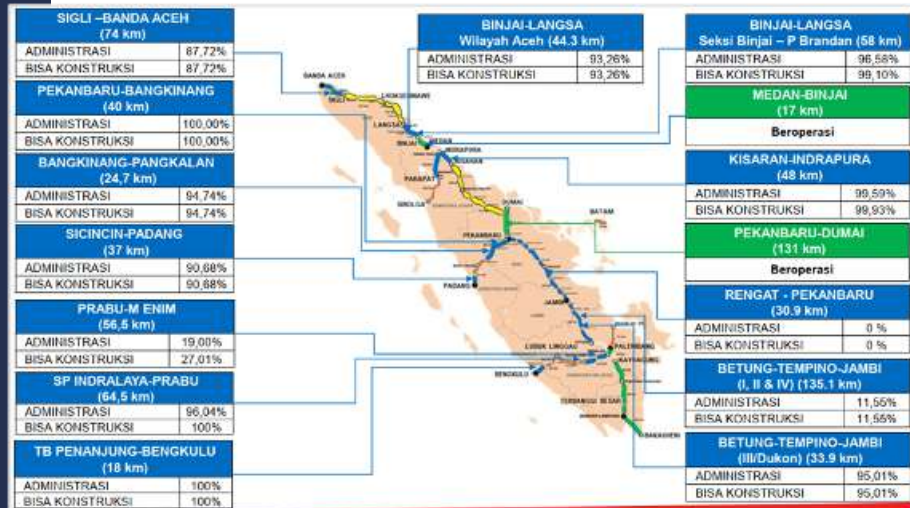
JALAN TOL TRANS SUMATERA

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 2.828 km digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional di regional Sumatera.

Peran dari Kemenko Marves yakni Mengkoordinasikan dengan stakeholders terkait dalam mengawal proses Percepatan Kebijakan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.

Adapun capaian tahun 2023 terselesaikannya pembebasan lahan JTTS Tahap I dan berlanjutnya proses konstruksi JTTS tahap I. Berhasil mendorong terselesaikannya pembebasan lahan untuk 17 ruas tahun 2023



Untuk ruas yang masih dalam proses pembebasan lahan, Progress Pada saat ini berada di posisi 88%. Secara Paralel, pembebasan lahan untuk JTTS tahap II juga sedang berjalan.

Dampak yang dirasakan masyarakat yakni meningkatkan roda perekonomian serta konektivitas transportasi di daerah Trans Sumatera serta memangkas waktu tempuh antar kota di Trans Sumatera.





ESTABLISHMENT OF THE KOREA- INDONESIA HIGH LEVEL DIALOGUE ON INVESTMENT

MoU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi RI-Korea melalui disepakatinya Hasil Pertemuan 1st High Level Dialogue on Investment Indonesia - Korea terkait investasi bidang kesehatan, industri, infrastruktur, lingkungan, dan kelautan pada Tahun 2023 hingga tahun 2024

Pemerintah Indonesia akan membantu mendorong realisasi investasi Perusahaan Korea di Indonesia dan Bersama menanggulangi hambatan investasi yang ada. Pemerintah Korea juga berkomitmen untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia terutama dalam bidang Kesehatan, infrastruktur, industri dan pengembangan IKN.

Kerja sama Kesehatan antara beberapa RS Indonesia dan Korea berjalan dengan lancar. Beberapa sedang proses finalisasi MOU.

Kerja sama industri kendaraan listrik akan terus dikembangkan ekosistemnya dengan Hyundai dan LG Konsorsium

Pembangunan infrastruktur dasar sedang dilakukan untuk mendukung pabrik Korea yang beroperasi di Indonesia.

Kerja sama pengembangan IKN juga terus didorong oleh kedua belah pihak

- Monitoring untuk mendorong percepatan penyelesaian permasalahan investasi yang dialami oleh pihak Korea dengan berkoordinasi dengan K/L terkait
- Dilakukan komunikasi dengan Perusahaan Korea yang ada di Indonesia untuk memastikan kegiatan berusaha lancar dan PEMRI bisa cepat tanggap menanggapi jika terdapat isu
- Promosi proyek2 investasi yang bisa dikerjasamakan dengan pihak Korea Selatan



PERCEPATAN PENGADAAN LAHAN IKN



Dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

Dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, perolehan lahan merujuk pada upaya memperoleh lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut.

IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentrism serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara Menko Marves ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Jumlah perolehan lahan dari ex pelepasan kawasan hutan tahap I seluas 36.150 Ha.

Kemenko Marves mendorong sehingga dapat terbit peta tematik yang menjadi dasar penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di area yang clean and clear seluas 34.000 Ha, terdiri dari:

- HPL 05 PPU seluas 70.300 m² (Bank Indonesia)
- HPL 06 PPU seluas 346.800 m² (PSSI)
- HPL 007 PPU seluas 253,39 Ha
- HPL 008 PPU seluas 25.637,85 Ha
- HPL 018 KUKAR seluas 8,14 Ha

Terdapat sisa seluas 2.085,61 Ha yang belum clean and clear dan memerlukan peran koordinasi Kemenko Marves dalam melakukan analisa masalah dan pengambilan keputusan sehingga hak-hak pihak ke 3 (masyarakat) dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat, yang pada akhirnya dapat diberikan legalitas berupa penerbitan sertipikat HPL kepada OIKN.

Dari 12 paket kegiatan pengadaan tanah di IKN, telah selesai 6 paket kegiatan dan masih berproses 6 paket kegiatan pengadaan tanah yaitu:

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Infrastruktur Tahap 1 (Wilayah Pengembangan 1A);
- Instalasi Pengolahan Limbah;
- Sistem Penyediaan Air Minum;
- By Pass Pasar Sepaku;
- Bendungan Sepaku Semoi Tahap II;
- Duplikasi Jembatan Pulau Balang.

Tindak lanjut 2024

- Mengingat IKN merupakan proyek multiyear dengan keluarnya Penetapan Lokasi (Penlok) baru untuk proyek-proyek pendukung infrastruktur IKN, diperlukan monitoring dan pengawalan yang intensif.
- Perlu segera diselesaikan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) yang terpadu dengan perolehan tanah dan investasi di IKN.
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara yang berakhir pada 31 Desember 2023 dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

KESEKRETARIATAN

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves

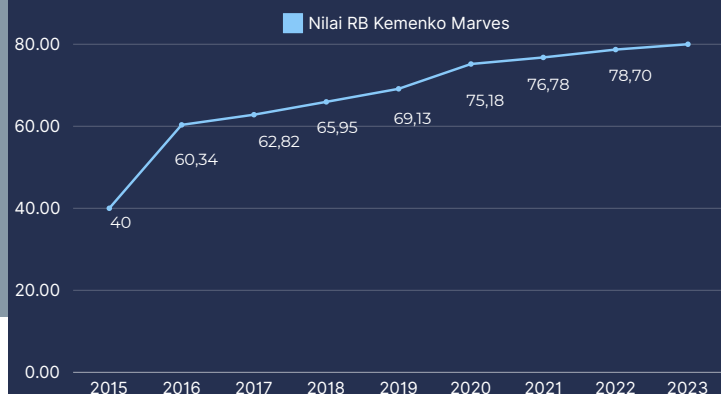
PELAKSANAAN *Reformasi Birokrasi*

Penguatan pelaksanaan RB yang terlaksana dengan baik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka mencapai bentuk birokrasi yang berkelas dunia (World Class Bureaucracy) yang dicirikan dengan birokrasi yang melayani publik dengan prima dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan birokrasi.

Kemenko Marves telah menyusun Road Map Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan 2 metode yaitu internal dan eksternal. Internal dilakukan evaluasi secara berkala yang dikoordinasikan oleh Tim pengelola RB Pusat dan melibatkan Tim RB unit kerja Eselon I. Eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB yang diawali dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pendalaman evaluasi (Entry dan Exit Meeting).



Kemenko Marves terus melakukan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan RB, antara lain menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh KemenPANRB, serta terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam digitalisasi guna mendukung implementasi SPBE.





PENGELOLAAN JDIH

Peningkatan layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, lengkap dan mudah

Capaian:

Kemenko Marves tidak hanya menjadi Juara JDIHN, namun juga mendorong 7 K/L di bawah koordinasinya agar menjadi 10 Besar JDIHN terbaik dan juga memberikan penghargaan khusus di bawah koordinasi Kemenko Marves dengan kategori Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kategori Pengelolaan Dokumentasi Hukum, Kategori Pengelolaan Organisasi Terbaik untuk mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, lengkap dan mudah bagi masyarakat.

Dampak

- Tersedianya Sarana penyampaian informasi hukum yang berkualitas
- Tersedianya fasilitas layanan bantuan hukum
- Mudahnya akses JDIH Marves yang bisa di download di play store dan app store

Rencana Aksi:

- Pemenuhan standar pengelolaan JDIH Marves sesuai dengan Permenkumham No. 33 Tahun 2012
- Peningkatan sistem dengan mengintegrasikan media sosial Instagram JDIH Marves ke dalam tampilan website.
- Penyediaan sistem JDIH Marves yang dapat di download melalui iOS dan Android.
- Penyediaan informasi peraturan melalui berita, infografis, videografis, reels, dan video footage
- Peningkatan sistem dengan notifikasi google
- Peningkatan kemampuan search engine website JDIH Marves



Penghargaan JDIHN Terbaik I Nasional 2021, 2022 dan 2023



SETMENKO MARVES

Pengelolaan RB bersifat manual serta bukti dukung tersebar pada PIC yang ditunjuk. Mengingat dinamisnya penataan SDM, sehinggaberdampak pada tidak terdeteksinya posisi perkembangan pengelolaan RB dari tahun ke tahun (dokumen bukti dukung hilang).

ERB terus berkembang dengan fitur yang sudah menyesuaikan sesuai Permenpan No 3 Tahun 2023, ERB menjadi rekomendasi oleh Kementerian PANRB kepada K/L untuk menjadi contoh pengelolaan praktik baik RB, adapun ERB telah diadopsi oleh Badan Informasigeospasial.

Membangun sistem informasi yang dapat mengefektifkan pengelolaan RB secara elektronik, sistem tersebut diberi nama ERB yang berfungsi sebagai data base dan alat pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan RB Kemenko Marves.



You and 389 people liked this.



SERMENKO MARVES

Leave a comment...



Dampak

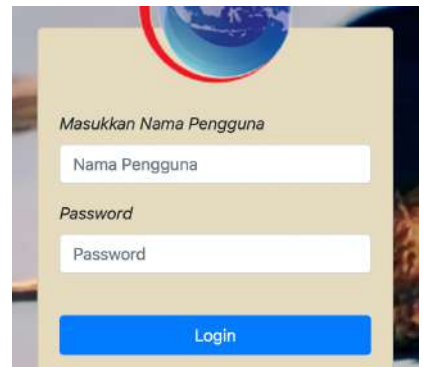
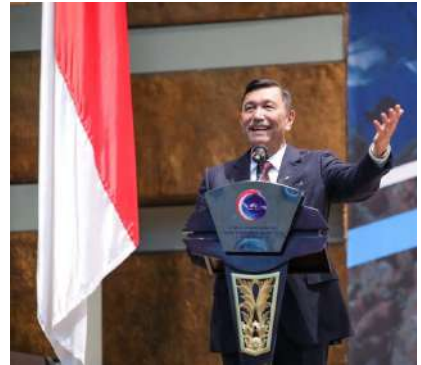
Efisiensi dalam pengelolaan bukti dukung RB dan penilaian PMPRB yang digunakan oleh unit kerja, Inspektorat dan Kementerian PANRB karena berbasis aplikasi. Efisiensi anggaran, sebelum ada E-RB proses penyiapan bukti dukung perlu melaksanakan rapatkoordinasi sebanyak 4 kali (per TW) dengan total anggaran mencapai 400 juta.



You and 407 people liked this.

Leave a comment...

SNAPSHOTS:



PENGELOLAAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi Pusat Layanan Terpadu di Kemenko Marves.

CAPAIAN

PPID Kemenko Marves sudah mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tiga tahun berturut-turut.

DAMPAK

Mempermudah dalam memberikan layanan dan mempercepat proses tindaklanjut pelayanan publik.

INOVASI

Membangun sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik, dengan layanan publik yang dikelola Kemenko Marves seperti Sistem Informasi Aspirasi Kemaritiman (PESAN), dan Layanan Utama di Kemenko Marves sesuai dengan Permenko No. 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko Marves.



Penguatan SPIP

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 terkait mekanisme penilaian antara penilaian mandiri oleh manajemen K/L, penjaminan kualitas, dan evaluasi oleh BPKP. Selain itu, untuk pemahaman tentang Manajemen Risiko dalam mendukung Pengendalian Internal.

DAMPAK

- Meningkatnya pemahaman terkait Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi K/L.
- Meningkatnya kemampuan terhadap pengendalian internal dengan memahami manajemen risiko.
- Meningkatnya budaya antikorupsi di lingkungan Kemenko Marves.
- Penurunan rekomendasi temuan audit secara signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

RENCANA AKSI

- Menyusun Kepmenko tentang Indikator Kinerja di Lingkungan Kemenko Marves.
- Menyusun Laporan Manajemen Risiko oleh seluruh unit eselon II di Lingkungan Kemenko Marves.
- Melakukan evaluasi atas Manajemen Risiko seluruh unit eselon II di Lingkungan Kemenko Marves oleh Inspektorat.
- Inspektorat telah melakukan evaluasi Whistleblower System secara berkala

Capaian



Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM



Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

RENCANA AKSI

Inspektorat sebagai TPI telah berupaya mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi TPI melalui asistensi dan konsultasi

DAMPAK

- Meningkatnya pemahaman unit kerja terhadap komponen LKE untuk menuju WBK/WBBM.
- Komponen tertentu dalam LKE yang menjadi persyaratan WBK/WBBM menjadi perhatian khusus bagi seluruh unit kerja.
- Meningkatnya usulan unit kerja untuk pengusulan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya.

Capaian



Jumlah Rekomendasi Inspektorat pada 6 unit kerja

telah ditindaklanjuti



Ketajaman IKU, penjenjangan kinerja, Kualitas Laporan, Pemanfaatan informasi pelaporan, manual IKU belum lengkap, pedoman evaluasi, penetapan target yang melibatkan K/L teknis.

CAPAIAN

- Juknis pengelolaan kinerja diterapkan dalam pengelolaan kinerja Tahun 2024
- Pedoman evaluasi sudah mulai digunakan pada evaluasi Tahun 2023
- Rekomendasi laporan kinerja lebih berkualitas dan dapat digunakan dalam perencanaan
- Implementasi SAKIP yang lebih berkualitas yang didukung SDM yang kompeten



RENCANA AKSI

- Melakukan penajaman IKU melalui reviu Renstra
- Penjenjangan kinerja menggunakan logical framework
- Peningkatan Kualitas analisa Laporan di semua level
- Pemanfaatan informasi pelaporan dalam perencanaan tahun berikutnya
- Penyempurnaan manual IKU
- Menyusun pedoman evaluasi sesuai PermenPAN & RB 88
- Melakukan koordinasi awal dengan K/L dalam penetapan target
- Penyusunan juknis pengelolaan kinerja
- Peningkatan kualitas SDM SAKIP

DAMPAK

Efektifitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kemenko Marves

71,14

2022

2023

72,78

“BB”

Capaian

“BB”



IMPLEMENTASI ARSITEKTUR SPBE NASIONAL



Tim SPBE Kemenko Marves menyusun Arsitektur To-Be SPBE yang melibatkan pimpinan unit kerja dalam penyusunan Arsitektur To-Be SPBE. Targetnya yakni: Tersusunnya Arsitektur To-Be SPBE kedalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Kemenpan-RB; Pemuktahiran Kepmenko 102/S tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kemenko Marves.

CAPAIAN

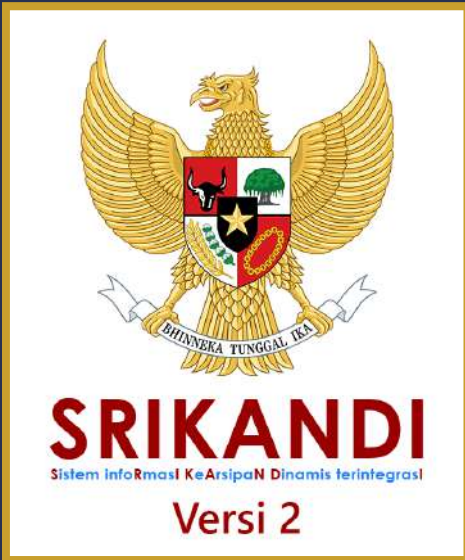
- Dokumen Arsitektur AS-IS SPBE (pada Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE Kemenpan-RB);
- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kemenko Marves.

DAMPAK

- Proses Bisnis dan layanan unit kerja terdefinisi dengan tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Aplikasi dan Data yang dihasilkan unit kerja dibangun/dikembangkan sesuai dengan proses bisnis dan layanan yang diberikan.



PELAKSANAAN DIGITALISASI ARSIP



Digitalisasi dokumen/arsip adalah salah satu cara proses mengubah dokumen/arsip konvensional ke dalam berbagai bentuk dan media menjadi dokumen/arsip elektronik/ digital.

- Pemanfaatan SRIKANDI secara menyeluruh sebagai implementasi SPBE
- Melaksanakan tanggung jawab anggota simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

capaian
2023



CAPAIAN

- Telah dilakukan alih media sesuai dengan standar dan memenuhi target yang ditetapkan
- Aplikasi SRIKANDI telah terimplementasi
- Kemenko Marves telah memiliki SDM yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik
- Kemenko Marves telah terdaftar sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

RENCANA AKSI

- Melakukan Finalisasi Penyusunan Revisi Permenko Nomor 1 Tahun 2020
- Melakukan Identifikasi terhadap Arsip yang sudah habis masa retensinya
- Melaksanakan Bimtek Kearsipan
- Mengikuti Bimtek Bimbingan Teknis Pendamping Digitisasi Arsip Kertas Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Benchmarking dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
- Evaluasi hasil penataan Arsip Kementerian yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Juara 3 nilai IKPA terbaik tahun 2021 kategori satuan kerja pusat pagu kecil.

RENCANA AKSI

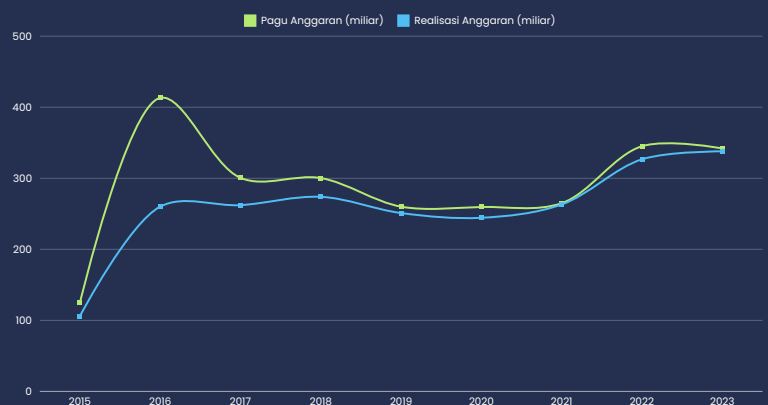
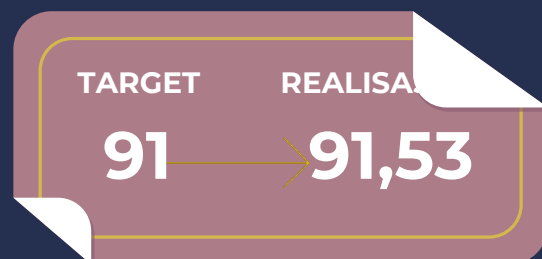
Meningkatkan nilai melalui indikator Penyerapan Anggaran yang memiliki bobot 20% dari total penilaian. Nilai Penyerapan Anggaran hingga tahun 2023 adalah.....

DAMPAK

Nilai IKPA menggambarkan aspek

- Kualitas Perencanaan Anggaran
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Semakin tinggi nilai IKPA menggambarkan semakin tinggi juga ketiga aspek pengelolaan keuangan di atas.



INDEKS PENGELOLAAN ASET

Pemeliharaan dan updating kondisi BMN membutuhkan Komitmen, sistem dan pengawasan yang berkelanjutan



CAPAIAN

- Penyampaian Laporan BMN dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian tepat waktu
- Penyusunan RKBMN sesuai target
- penyelesaian rekomendasi temuan BPK terkait pengelolaan BMN

DAMPAK

- Peningkatan kepatuhan administrasi pengelolaan BMN
- Realisasi PNBPN melalui pengelolaan BMN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang terukur dan tepat waktu
- Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset
- Pengelolaan fisik BMN yang akuntabel

RENCANA AKSI

- Percepatan proses sertifikasi tanah Kalideres
- Ketepatan waktu pelaporan pengelolaan BMN
- Tindak lanjut pengelolaan BMN sesuai ketentuan (pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan)
- Akselerasi tindak lanjut temuan BPK

TINGKAT TINDAK LANJUT *Pelayanan Public*



PESAN

PESAN sebagai inovasi layanan dari Bagian Humas, PESAN memberikan layanan rata-rata 42 layanan setiap bulannya. PESAN terkoneksi dengankontak kami yang terdapat dalam website maritim.go.id

SPAN sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Marves dapat mengintervensi pengaduan masyarakat terhadap 7 K/L dalam Koordinasi Kemenko Marves.

PPID: Kemenko Marves dibentuk untuk menjalankan amanah UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

RENCANA AKSI

- Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Publik Melalui Web base dan Mobile
- Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Artificial Intelegent dalam pelaksanaan informasi publik
- Integrasi Layanan Pelayanan Publik dalam satu dashboard pengelolaan

DAMPAK

- Mempermudah dalam memberikan pelayanan
- Mempercepat proses tindak lanjut pelayanan publik
- Mempermudah staf pengelola pelayanan publik dalam mendistribusikan permohonan kepada unit kerja



INDEKS KUALITAS *Kebijakan*

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.

Kebijakan yang diinisiasi Kemenko Marves dalam bentuk Peraturan Menko perlu di nilai kualitasnya.

CAPAIAN

- Penilaian mandiri tahun 2023 sebesar 100%.
- Penilaian Tahun 2022 n.a

PM Tahun 2023

100%

RENCANA AKSI

- Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (LAN)
- Mengidentifikasi Permenko yang memenuhi syarat dan ketentuan IKK dan mengusulkan kepada LAN
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan menyiapkan bukti dukung melalui sistem IKK.
- Mengirimkan kepada Koordinator LAN hasil penilaian mandiri.



Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan
Pada Instansi Pemerintah



INDEKS *Reformasi Hukum*

Pengukuran terhadap kualitas regulasi, deregulasi dan database sesuai standar layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

CAPAIAN

- Terwujudnya harmonisasi peraturan yang memenuhi syarat serta menghasilkan regulasi yang berkualitas
- Terwujudnya ASN Legal Drafter yang berkualitas
- Terwujudnya re-regulasi dan/atau deregulasi peraturan perundang undangan

DAMPAK

- Tersedianya peraturan yang berkualitas
- Tersedianya database yang sesuai dengan standar layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum



Capaian
Tahun 2023

99,20

A

SANGAT
BAIK



RENCANA AKSI

- Penguatan koordinasi dalam harmonisasi peraturan
- Penguatan Kompetensi ASN Legal Drafter yang berkualitas
- Analisis dan evaluasi peraturan perundang - undangan
- Penataan database peraturan perundang undangan

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indeks Tata Kelola Pengadaan [ITKP] sebagai Nilai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pengadaan



- Seluruh PPK memiliki perhatian penuh dalam meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan
- Meningkatkan awareness PPK untuk mengumumkan RUP sesuai dengan pagu pengadaan
- Seluruh PPK melakukan penyelesaian proses e-Tendering, pengisian seluruh menu katalog, pencatatan Non e-Tendering / Non e-Purchasing dan pengisian e-Kontrak

RENCANA AKSI

- Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan
- Pengusulan rekomposisi kebutuhan SDM PBJ
- Menyusun evidence tingkat kematangan UKPBJ dan Asistensi/Konsultasi kepada pembina wilayah di LKPP



CAPAIAN



INDEKS

Sistem Merit

Nilai capaian aspek sistem merit Kemenko Marves bernilai baik



- Dokumen Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi menjadi acuan dalam pengembangan pegawai.
- Penilaian SKP semakin objektif dengan telah adanya penerapan penilaian 360 dalam aplikasi e-kinerja
- Adanya acuan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
- Kebijakan internal yang telah disusun akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian.
- Pemanfaatan aplikasi kepegawaian yang ada seperti layanan hukuman disiplin dan layanan administrasi kepegawaian yang telah terintegrasi



DAMPAK

- Meningkatkan awareness dari masing-masing pegawai dalam pengembangan karir.
- Kinerja pegawai dapat dijadikan tolak ukur karena sudah semakin objektif dalam penilaiannya.
- Meningkatkan pemahaman pegawai dalam pengembangan kompetensi.
- Kebijakan internal kepegawaian dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian.
- Layanan administrasi kepegawaian semakin mudah dan selalu terupdate



CAPAIAN 2023

- Penyusunan Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi.
- Penilaian Kinerja dengan metode 360 di dalam aplikasi e-kinerja.
- Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- Penyusunan kebijakan internal Kepegawaian.
- Pemanfaatan Aplikasi dalam layanan kepegawaian yang telah terintegrasi



INDEKS

Pelayanan Publik

- Pengusulan Unit Lokus Evaluasi Pelayanan Publik
- Penginputan Eviden Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Unit Penyedia Layanan



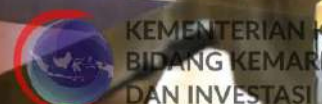
BARANG PUBLIK
(layanan risalah rapat-Roren)

JASA PUBLIK
(layanan PPID-RoSi)

ADMINISTRATIF
(layanan progres permohonan paraf -Rokum)



- Meningkatkan pelayanan yang ada di Kemenko Marves
- Menilai secara mandiri atas pelayanan yang diberikan kepada stakeholder
- Keterbukaan Informasi atas Pelayanan Kemenko Marves





PENGUATAN AKUNTABILITAS *Keuangan*

Capaian WTP tidak hanya bergantung pada pemahaman Akuntansi Pemerintahan oleh Tim Penyusun LK akan tetapi juga bergantung pada cara pelaksanaan anggaran oleh unit kerja yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RENCANA AKSI

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tim Penyusun Laporan Keuangan dalam rangka menjaga kualitas Laporan Keuangan

**WTP
2016 S.D 2023**

Kemenko Marves mendapat WTP 7 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan 2016 - 2023.

Meskipun WTP tidak menggambarkan bahwa Kementerian Lembaga bebas dari fraud akan tetapi capaian opini selain WTP akan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada instansi pemerintah yang dapat berdampak pada penurunan kontribusi masyarakat untuk negara.



INDEKS Berakhlak

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi menjadi penting untuk mendorong perubahan sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture set ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif.

RENCANA AKSI

- Internalisasi BerAKHLAK kepada JPT Madya dan JPT Pratama
- Marves Corner (Talkshow mengundang para praktisi yang inspiratif) dengan materi turunan dari core values BerAKHLAK secara berkala per 2 minggu
- Optimalisasi Agen Perubahan dalam mendukung internalisasi BerAKHLAK
- Publikasi konten BerAKHLAK melalui media sosial secara berkala
- Outing di masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai penguatan unsur Harmonis dan Kolaboratif



DAMPAK

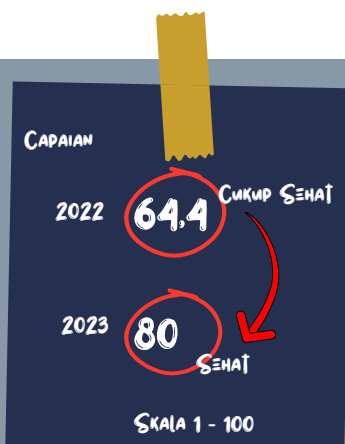
- Terdapat deklarasi Komitmen Pimpinan Tinggi untuk menjadi teladan dan mendukung implementasi BerAKHLAK
- Tingkat partisipasi pegawai sebagai komitmen mendukung pelaksanaan implementasi BerAKHLAK
- Terpilihnya Agen Perubahan Teladan Tingkat Kementerian sebagai role model BerAKHLAK
- Sarana media sosial agar lebih bervariasi dalam pelaksanaan internalisasi BerAKHLAK kepada seluruh pegawai
- Pelaksanaan outing sebagai sarana membentuk kekompakan para pegawai dengan memasukkan unsur-unsur BerAKHLAK



01 KATEGORI THE BEST STARTER DENGAN NILAI TERTINGGI DARI SELURUH K/L DAN PEMDA YAITU 64,4% (CUKUP SEHAT)

02 KATEGORI BEST STARTER CORE VALUES AKUNTABEL DENGAN NILAI 82,3% (SEHAT)

03 KATEGORI BEST STARTER CORE VALUES ADAPTIF DENGAN NILAI 59,5% (SEHAT)



PENGUATAN PENGECAHAN KORUPSI SPI

Persepsi internal melihat pelaksanaan tugas di instansi masih memiliki risiko yang tinggi seperti pengelolaan anggaran, konflik kepentingan pengelolaan PBJ dan SDM

CAPAIAN

- SPI telah dilaksanakan dari Bulan Juli hingga Oktober 2023
- Terlaksananya rencana aksi SPI atas hasil rekomendasi KPK 2022
- Monitoring pengisian survei hasil SPI (internal, eksternal, eksper)
- Tersedianya media pengaduan SPPH



CAPAIAN
INDEKS
INTEGRITAS
2022

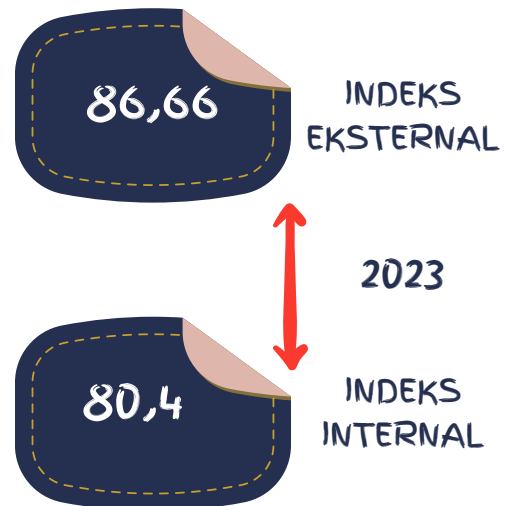


DAMPAK

- Peningkatan literasi pencegahan korupsi oleh seluruh pegawai melalui sosialisasi pencegahan korupsi yang dilaksanakan di Kemenko Marves
- Perbaikan pelaksanaan tugas seperti peningkatan tata kelola pengadaan dan pengelolaan SDM di KemenkoMarves

RENCANA AKSI

- Perbaikan pengawasan internal lebih proaktif oleh APIP melalui audit operasional perjalanan dinas, audit BMN, probity audit PBJ, dan monitoring benturan kepentingan berkala
- Intensifikasi sosialisasi pencegahan korupsi melalui sosialisasi PBJ, anti gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM
- Penyediaan payung hukum dan media pengaduan Sistem Pelaporan Pelanggaran Hukum (WBS)



LAPOR:
0812-5008-5006

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

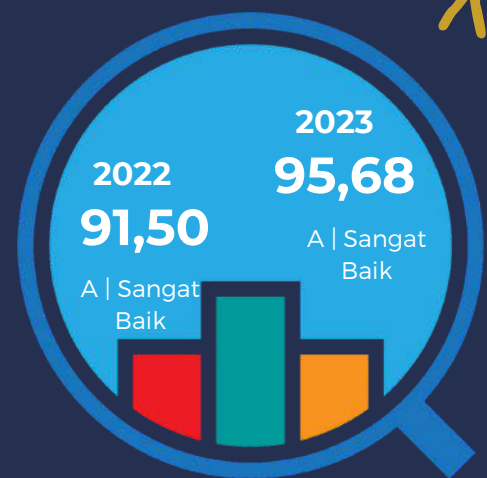
SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

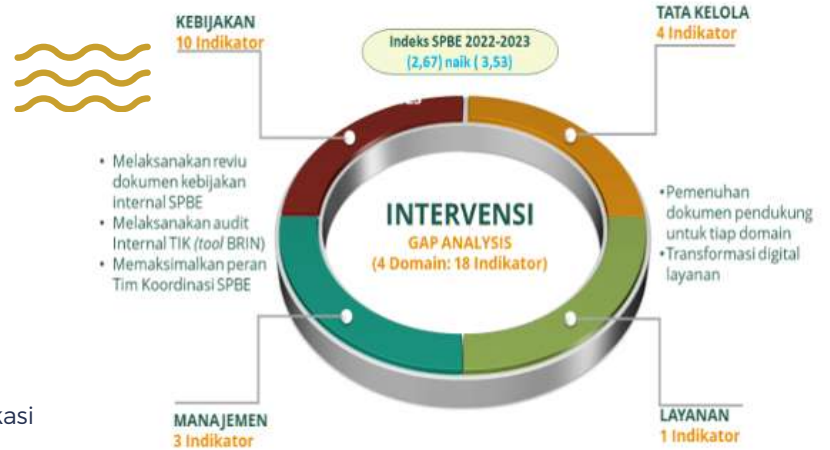


DAMPAK

- Masyarakat/Pengguna Layanan dapat melakukan penilaian terhadap layanan yang ada di Kemenko Marves
- Peningkatan Pelayanan (Service) untuk memberikan layanan yang prima sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- Peningkatan Sarana Prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi Masyarakat/Pengguna Layanan.



INDEKS SPBE



SPBE penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

CAPAIAN TAHUN 2023



Kebijakan dalam mendukung kegiatan SPBE di Kemenko Marves

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 114S Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan SPBE di Kemenko Marves;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 102/S Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenko Marves.

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.







Arif Rahman
Kepala Biro Perencanaan



Yetri Fermila
Perencana Ahli Madya
Bagian Akuntabilitas Kinerja



Indra Nugraha
Perencana Ahli Muda
Sub Bagian Pelaporan Kinerja



Andini Mey Larasati
Analisis Pelaporan
Sub Bagian Pelaporan Kinerja



Anisa Nurhudaya P
Pelaksana
Sub Bagian Pelaporan Kinerja



Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.
Tlp. +62-21-23951100; Fax: +62-21-3141790



maritim.go.id



[@kemenkomarves](https://www.instagram.com/kemenkomarves)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI



Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi



[@kemenkomarves](https://www.x.com/kemenkomarves)



[@kemenkomarves](https://www.spotify.com/artist/kemenkomarves)